MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Disusun oleh:
Edy Hardiyanto, S.Pd.,MT
Agus Ramdani
Dr. Wartanto
Drs. Sucahyono, M.Pd

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
2015

KATA SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah berjalan pada akhir tahun 2015. Disadari atau tidak, MEA akan sangat terkait dengan kompetisi yang makin tajam di kawasan Asia Tenggara. Kendati idealnya MEA dirancang untuk memberikan manfaat bagi semua negara anggota ASEAN, Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan memaparkan bahwa MEA merupakan persaingan antar negara.

Kondisi ekonomi yang dihadapi secara nasional dan harus bersinggungan dengan penetapan MEA di tingkat kawasan merupakan tantangan nyata Ditjen PAUD dan Dikmas lima tahun mendatang untuk tetap memberikan kontribusi positif dalam bidang pendidikan terutama bagi masyarakat di luar sekolah sehingga masyarakat akan sangat siap menghadapi tantangan dalam persaingan antar negara di Asia Tenggara.

Kami menyambut baik diterbitkannya buku "*Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN* (*MEA, ASEAN Economic Community*)", sebagai upaya memperluas akses dan meningkatkan mutu program serta layanan PAUD dan Dikmas dalam menghadapi MEA. Semoga buku yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan dapat bermanfaat untuk masyarakat, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya.

Jakarta, November 2015
Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas

Ir. Harris Iskandar, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga buku ini yang berjudul "Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (*Mea, ASEAN Economic Community*) dapat diselesaikan. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan referensi bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam membuat berbagai macam kebijakan dan program dalam menghadapi MEA,

Buku ini secara spesifik membahas mengenai 4 pokok bahasan, pertama mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economy Communty*), kedua mengenai Kedudukan, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Ketiga mengenai MEA: Antara Harapan dan Tantangan, dan keempat mengenai Kebijakan PAUD dan Dikmas dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Semoga buku ini dapat digunakan dan memenuhi kebutuhan sebagaimana mestinya. Tentu buku ini masih ada kekurangan dan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak. Dengan segala kerendahan hati kami mengharap adanya kritik dan masukan dalam upaya menyempurnakan buku maupun demi peningkatan kompetensi penulis buku Kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini dan pendidikan Masyarakat yang telah membantu dalam mewujudkan penerbitan buku disampaikan terima kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(ASEAN *Economic Community*)
A. Sejarah 1
B. PAUD dan Dikmas dalam Konstelasi MEA 12
C. Fenomena dan Masalah PAUD dan Dikmas saat ini... 18
D. Tantangan dan Peluang PAUD dan Dikmas dalam MEA 24

BAB II KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL PAUD DAN DIKMAS
A. Kedudukan..... 31
B. Wewenang..... 50
C. TanggungJawab 52

BAB III MEA: ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN
A. Produktivitas Kerja 57
B. Keahlian Kerja..... 58
C. Standarisasi Pekerjaan 60

BAB IV KEBIJAKAN PAUD DAN DIKMAS MENGHADAPI MEA
A. Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Berbasis Potensi Lokal 62
B. Pengembangan Program dan Produk..... 64
C. Penguatan Kelembagaan 66

PENUTUP 71

DAFTAR PUSTAKA 72

BAB I

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY*)

MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

A. Sejarah

KTT ASEAN di Kuala Lumpur Desember 1997 telah memutuskan untuk menjadikan ASEAN *a stable, prosperous, and highly competitive region with equitable economic development, and reduced poverty and socio-economic disparities (ASEAN Vision 2020)* (The ASEAN Secretariat, 2014:5). Visi ini menghendaki ASEANsebagai kawasan stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Lima tahun kemudian setelah di Kuala Lumpur, bulan Oktober 2003, KTT di Bali menegaskan tiga kerangka dasar mewujudkan masyarakat ASEAN melalui dua belas butir *ASEAN Security Community*, lima butir *ASEAN Economic Communtiy* (Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA) serta enam butir *ASEAN Socio-cultural Community* (The ASEAN Secretariat, 2014:5). MEA sendiri merupakan wujud penyatuan ekonomi yang digariskan Visi ASEAN 2020 ditandai dengan perdagangan bebas barang dan jasa serta penanaman modal, perkembangan ekonomi berkeadilan dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosio-ekonomi. Melalui MEA diselaraskan pula kepentingan dan upaya penyatuan ekonomi berdasarkan prakarsa yang ada dan direncanakan mengacu patokan waktu yang jelas. Dengan MEA hendak dibentuk pula pasar tunggal dan basis produksi sejalan karakteristik wilayah dengan memanfaatkan peluang sebagai penyedia kebutuhan dunia.

Untuk itu semua, diperlukan mekanisme baru dan acuan untuk meneguhkan kondisi ekonomi yang ada termasuk Area Perdagangan Bebas (*ASEAN Free Trade Area, AFTA*), Kesepakatan Layanan Jasa (*ASEAN Framework Agreement on Services, AFAS*) dan Area

Penanaman Modal (*ASEAN Investment Area, AIA*), peningkatan penyatuan sektor prioritas, mendukung pelaku usaha, tenaga terampil dan berkompeten berkembang, serta meningkatkan mekanisme kelembagaan ASEAN dalam menyelesaikan persengketaan.

MEA mensyaratkan kerjasama pembangunan dan teknik sehingga seluruh negara anggota dapat berkembang bersama-sama disamping memerlukan pelaksanaan liberalisasi dan kerjasama saling menguntungkan. Sehingga dibutuhkan keterlibatan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, penghargaan atas kualifikasi pendidikan, konsultasi lebih cermat dalam kebijakan keuangan dan makro ekonomi, penyelenggaraan transaksi keuangan, peningkatan infrastruktur dan sambungan komunikasi, pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, menyatukan industri untuk memanfaatkan sumber daya dikawasan serta meningkatkan keterlibatan sektor swasta.

Pada hari Sabtu, 21 Nopember 2015 tepat sekitar jam 11.00 waktu setempat bertempat di Kuala Lumpur Convention Center, kesepakatan MEA ditandatangani oleh pemimpin negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Dalam pertemuan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi yang sekaligus menandatangani Kuala Lumpur Declaration.

1. Sumber Daya Manusia

Perkembangan jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan rata-rata di bawah satu setengah persen (lihat grafik 1.1).

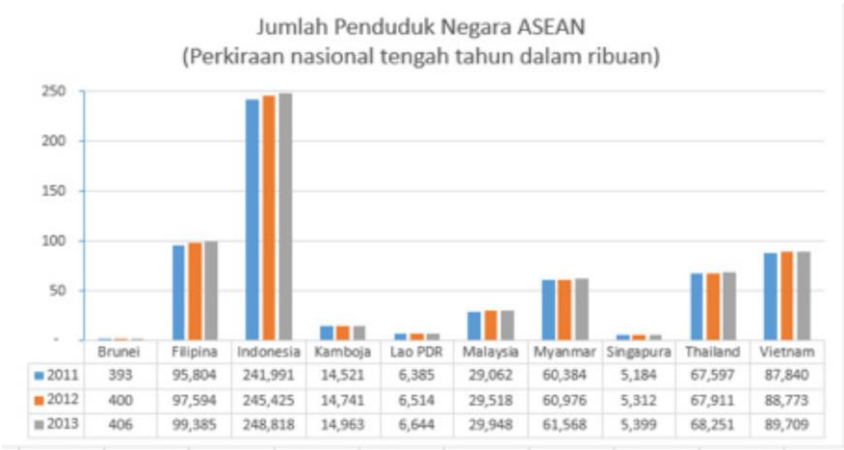

	Brunei	Filipina	Indonesia	Kamboja	Lao PDR	Malaysia	Myanmar	Singapura	Thailand	Vietnam
2011	393	95,804	241,991	14,521	6,385	29,062	60,384	5,184	67,597	87,840
2012	400	97,594	245,425	14,741	6,514	29,518	60,976	5,312	67,911	88,773
2013	406	99,385	248,818	14,963	6,644	29,948	61,568	5,399	68,251	89,709

Sumber: ASEAN Sekretariat, 2014 (diolah)

Negara anggota ASEAN dengan jumlah peningkatan tertinggi adalah Laos mencapai rata-rata satu koma empat persen dan peningkatan terendah adalah Thailand hanya mencapai nol koma empat persen selama kurun tiga tahun terakhir. Sementara jumlah peningkatan penduduk Indonesia mencapai rata-rata nol koma sembilan persen setara dengan 2,2 juta orang per tahun yang berarti menyumbang 42% peningkatan penduduk di seluruh kawasan.Dalam kurun waktu yang sama sejak 2011 hingga 2013 dicatat pertumbuhan ekonomi makro seluruh kawasan ASEAN meningkat sekitar dua persen berdasarkan harga berlaku saat ini dihitung dengan nilai mata uang *dollar* Amerika sebagai acuan. Ternyata pertumbuhan ekonomi kawasan ini menunjukkan perbedaan di setiap negara anggota (Lihat grafik1.2).

Grafik 1.2
Pendapatan Domestik Bruto Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku dalam Dolar Amerika

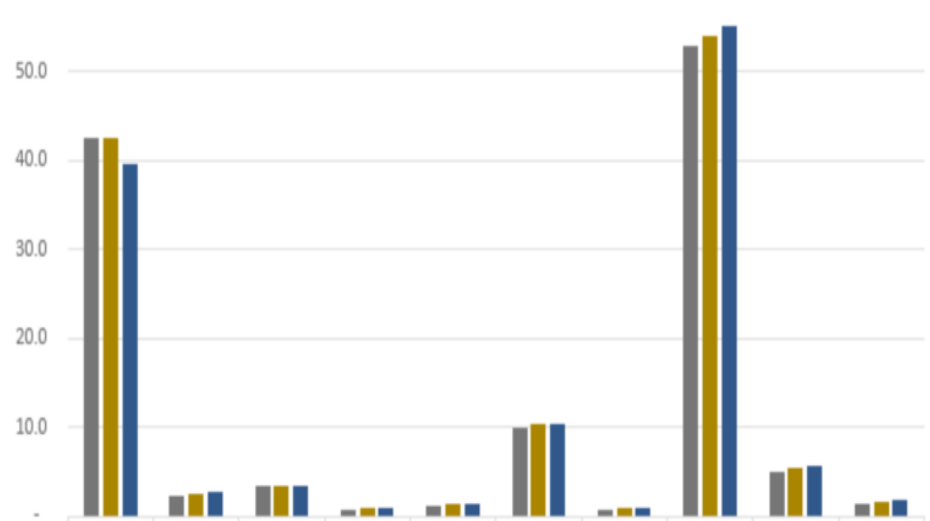

	Brunei	Filipina	Indonesia	Kamboja	Lao PDR	Malaysia	Myanmar	Singapura	Thailand	Vietnam
2011	42,431.5	2,339.2	3,498.2	881.7	1,262.4	9,962.1	853.2	52,865.3	5,116.0	1,543.0
2012	42,445.5	2,567.8	3,563.1	950.4	1,442.7	10,345.9	885.0	54,007.4	5,391.3	1,755.3
2013	39,678.7	2,706.9	3,459.8	1,036.7	1,547.7	10,420.5	887.8	55,182.5	5,678.7	1,908.6

Sumber: ASEAN Sekretariat, 2014 (diolah)

Dua negara anggota ASEAN mengalami pertumbuhan negatif, pendapatan domestik bruto per kapita Brunei ternyata turun mencapai rata-rata dua koma dua persen per tahun disusul Indonesia meskipun

hanya nol koma empat persen. Dari delapan negara anggota lain yang masih mengalami pertumbuhan positif, paling tinggi dicapai oleh Vietnam (7,9%), disusul Laos PDR (7,5%) dan Filipina (5,2%).Kenyataan masing-masing negara yang tidak sama di kawasan ini, sejak satu dasa warsa silam telah mengerucut menjadi pemahaman bersama untuk melahirkan masyarakat ASEAN.

Sejak tahun 1980-an persoalan produktifitas masyarakat yang diukur dari pendapatan per kapita telah menjadi perhatian pendidikan nonformal, kegiatan yang dikemas dalam program pemberdayaan dan peningkatan pendapatan keluarga meliputi: *Income Generating Learning Group* (*IGLG*),*Youth Leadership Training*, *Farmers Learning Group*, *Family Life Education Courses*, *Family Planning Groups* (Napitupulu,1989:167)

1. Kompetensi

Upaya pendidikan dalam meningkatkan kompetensi masyarakat dirasakan semakin strategis dan tinggi urgensinya ketika masyarakat baik individu maupun komunal tidak lagi berada di sekolah baik itu telah lulus maupun putus jenjang tidak dapat melanjutkan ke tingkat lebih tinggi.Geoffrey Hubbard (Sendov, dan Ivan Stanchev, 1988:204) ketika menanggapi tantangan dalam peradaban informasi sekarang ini melihat penyelenggaraan pendidikan tak lepas dari tiga tujuan berikut:

a. *To develop to the fullest extentpossible theinherent capacities of the individual,*
b. *To fit the individual to function effectively in the world,*
c. *To develop in individuals, the capacity to form their standar and make their own judgements*.

Mengembangkan dan menyeleraskan peran, kapasitas dan kompetensi merupakan tanggung jawab sekaligus kebutuhan individu sepanjang masa. Masyarakat di luar sekolah bukan mereka sendiri yang hanya menamatkan pendidikan dasar, ada juga anggota masyarakat yang putus jenjang pendidikan dasar bahkan tidak sekolah dengan berbagai alasan ditambah masyarakat tuna aksara. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi sekalipun, seseorang akan menjadi anggota masyarakat di luar sekolah pula.

Setiap kategori masyarakat luar sekolah sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki niscaya membutuhkan

informasi, pengetahuan dan pengalaman baru. Terlebih dengan paparan media sosial, elektronik serta kesepakatan MEA semua orang tidak terkecuali harus belajar, memahami, mengerti dan mengalami perubahan yang tejadi dan mengantisipasi kejadian di masa akan datang.

Kompetensi adalah *the ability and readiness touse knowledge, skills and personal, social, and methodological competence in work or study situations and for occupational and personal development*. Lebih lanjut,kompetensi dibedakan menjadi dua; *professional competence*, terdiri atas *knowledge* dan *skills*, sedangkan *personal competence*, mencakup *social competence* dan *self-competence* (Brockmann, Michaela, LindaClarke dan Christopher Winch, 2011:65).

Sementara kategori kompetensi yang dirujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 10 ayat (1) menyatakan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi: kompetesi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Sesungguhnya, kompetensi pedagogik adalah bagian dari kompetensi profesional, tidak perlu dibedakan kompetensi pedagogik dari kompetensi professional, sedangkan kompetensi kepribadian sendiri meliputi kompetensi sosial.

Mengenai kompetensi pribadi itu sendiri, berdasarkan catatan Philip Phenix dalam *Realms of Meaning*: *A Philosophy of the Curriculum* disebutkan enam kompetensi(Gautama, dan Bagus Dharmawan (ed.), 2008: 123-124), yaitu:

a. *Symbolic*
b. *Empirics*
c. *Esthetics*
d. *Synnoetics*
e. *Ethics*
f. *Synoptics*

Kompetensi secara terbatas dan sederhana dalam bekerja memiliki pengertian keahlian (*expertise*) dan kewenangan (*authority*) seseorang untuk melakukan tugas/pekerjaan dalam jabatan tertentu mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan dalam jabatan tertentu.

a. Literacy

Berkenaan dengan kompetensi literasi, pengalaman belajar setiap orang berbeda dalam menguasai jenjang kecakapan literasi. Kegiatan dan pengalaman belajar di sekolah belum dapat memberikan hasil yang sama dalam mencapai enam*literacy skills* (Evans,1979:38).

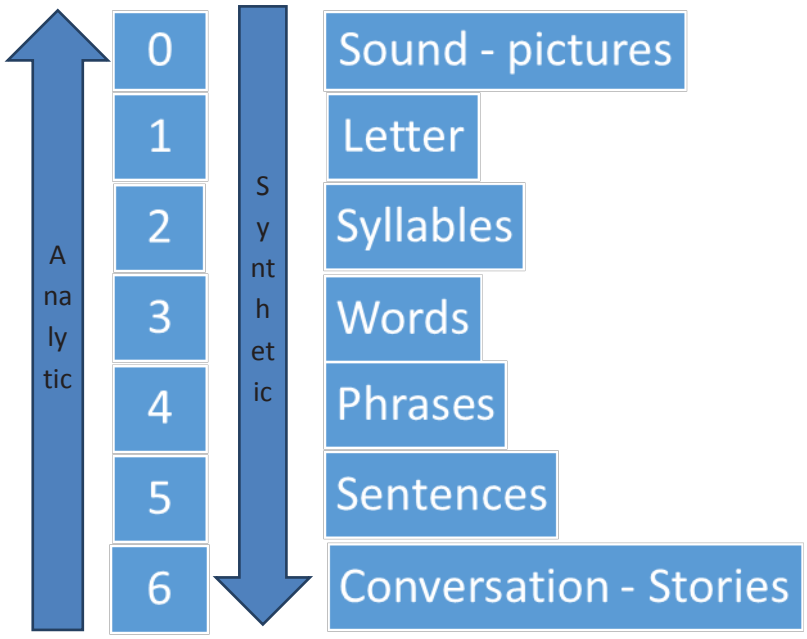

Gambar I.1. *Representation of the skills involved in literacy training* (diadaptasi)

b. Numeracy

Berdasarkan pendekatan yang sama terhadap literasi David R. Evans (1979:60-61) memandang hirarki keaksaraan dalam angka (lihat Gbr. I.2). Apabila dalam program literasi masyarakat menggunakan simbol bahasa dan bunyi yang telahakrab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan mereka. Maka keaksaraan dalam angka, masyarakat dihadapkan pada konsep dan kenyataan yang asing dan baru dikenal sebagai lambang dari angka yang mewakili suatu besaran. Termasuk keaksaraan dalam angka memperkenalkan operasi hitung seperti penjumlahan dan pengurangan yang mudah dipahami berbeda dengan perkalian atau pembagian.

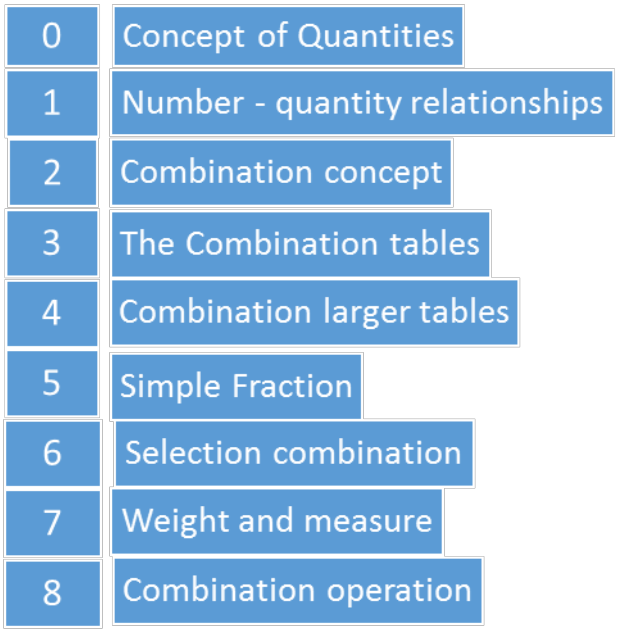

Gambar 1.2. *Hierarchy of numeracy Skills* (diadaptasi)

c. Social Literacy

Terdapat tiga komponen kecakapan *social literacy*, yakni:

1) *The act of naming the reality of one's life,*
2) *The ability to use the name to understand that reality,*
3) *The ability to act co-operatively with one's fellows to transform that reality*(Evan,1979:79-81).

Kemampuan literasi sosial didampingi kemampuan teknis membaca dan berhitung memberikan dasar bagi seseorang baik secara pribadi maupun berkelompok untuk bersama-sama menyadari kenyataan yang ada. Tingkat partisipasi secara efektif menjadi tujuan utama pendidikan literasi sosial.

Perkembangan dan dinamika masyarakat di tanah air telah mewarnai ragam jenis keaksaraan sebagaimana harus dipadukan dalam kurikulum pendidikan nasional, sehingga perkembangan seseorang sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dilengkapi kesadaran terhadap tantangan di masa mendatang. Ragam jenis keaksaraan ini meliputi:

a) Keberaksaraan budaya untuk mengenal nilai nilai budaya bersama, yaitu kemampuan memahami dan mengapresiasi persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam adat istiadat, nilai dan kepercayaan dalam budaya sendiri maupun budaya orang lain
b) Keberaksaraan ilmiah agar sains atau ilmu pengetahuan diterima khalayak dan lekat dengan kegiatan kehidupan sehari-hari
c) Keberaksaraan kesehatan menjadi ukuran kemampuan mengakses, memahami dan menerapkan informasi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan.
d) Keberaksaraan informasi sebagai kemampuan mengenali, menilai dan menggunakan dengan efektif informasi untuk menyelesaikan masalah
e) Keberaksaraan ekologi sebagai kemampuan memahami kerja alam dan berinteraksi denga lingkungan
f) Keberaksaraan keterampilan berkaitan dengan mata pencaharian dan pemanfaatan peluang kerja
g) Keberaksaraan teknologi informasi dan komunikasi sebagai kemampuan teknologi digital, perangkat dan jaringan komunikasi
h) Keberaksaraan agama (Gasim,2010:87-88)

Berkenaan dengan keberaksaraan teknologi informasi dan komunikasi, Elih Sudiapermana dan Kuswantono (2010:68) menggambarkan keterkaitan melek informasi, melek komputer dan melek teknologi (Lihat gambar 1.3) sehingga keberaksaraan teknologi

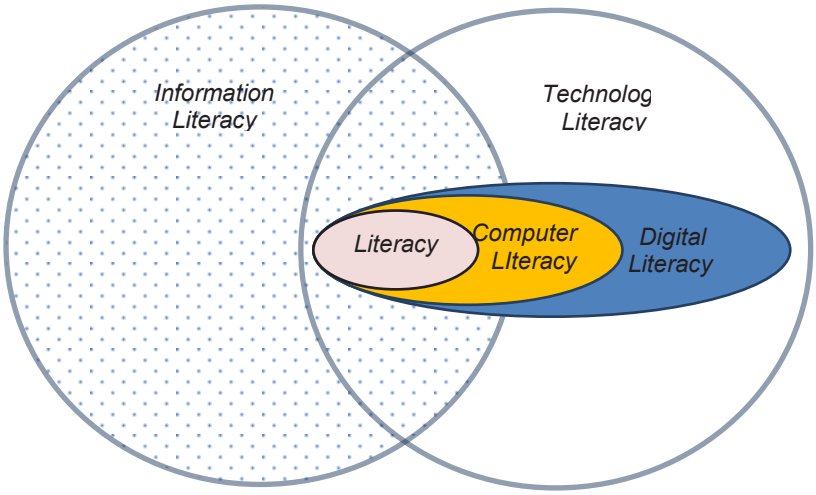

Gambar 1.3. Keterkaitan *E-Literacy* (Sudiapermana dan Koeswantono, 2010:68) (diadaptasi)

informasi dan komunikasi merupakan fungsi dari akses msayarakat terhadap informasi melalui internet yang didukung keunggulan teknologi informasi dan komunikasi.

Tingkat kecakapan *E-literacy* berdasarkan konsep Personal – Capability Maturity Model (P-CMM) dibedakan menjadi lima tingkatan dilihat dari keberadaan TIK yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

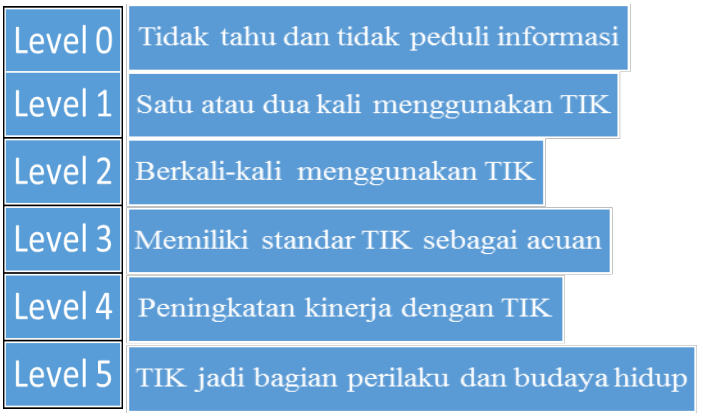

Gambar 1.4. Tingkat Kecakapan E-Literacy
(Sudiapermana dan Koeswantono,2010:69) (Diolah)

Menyikapi kenyataan terhadap TIK di empat negara anggota ASEAN terutama dalam pemanfaatan indikator ICT bidang pendidikan (tabel 1.1).

3. Kompetisi

Kompetisi Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang relatif tinggi dari tahun ke tahun selain memicu eksploitasi sumber daya alam juga meningkatkan kebutuhan terhadap ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan menjalankan ragam kegiatan ekonomi baik di bidang formal maupun informal.

Kesepakatan MEA yang ditandatangani melalui kesepakatan deklarasi Kuala Lumpur 2015, Sabtu, 21 Nopember 2015 telah membuka kesempatan lebih luas terhadap kebutuhan tenaga sumber manusia melewati batas wilayah negara yang selama ini berlaku. Selain kesempatan luas dipastikan juga MEA menghendaki pergerakan tenaga manusia dalam mengisi kebutuhan posisi dan jabatan pekerjaan yang muncul di kemudian hari.

Tabel 1.1 *Comparison of ICT Indicator Theme*

Countries	***Basic for ICY Indocators***	***Presence of Standars for Technology***	***Educational Level Covered***	***Studies***		
				Respondents	***Technology Coveres***	***Indocators***
Indonesia	*Curriculum centre government goalsand objectives*	*None*	*Elementary and secondary schools*	*Not specified*	*Computer and Internets*	*Quantitative, more of internet and computer use andaccess*
Malaysia	*Government*	*None*	*Elementary and secondary schools*	*Not specified*	*Computer and internets*	*Quantitative*
Philippines	*Senate Committee on Education, Arts and Culture with SEAMEO INNOTECH*	*None*	*Public and private elementary andseconda ry schools*	*School Based*	*All ICT related technologies such as television, projectors, radio/ cassett e players computersperi*	*Quantitative,* • *Availability of public/ commercial utilities and services* • *Computer skills of*

	Department of Education				*pherals and internet access*	*schools personnel* • *Presense of computers in schools* • *Instructional/ academic use of computer*
Thailand	*Government National Education Act of 1999*	*None*	*Primary and secondary schools*	*Not specified*	*Computers, internet, telephones, computerpe ripherals, ratio*	*Quantitative*

Sebagai contoh bidang layanan medis, empat negara di kawasan ASEAN telah menjadi rujukan utama pengobatan yang dikemas dalam wisata medis (Destinasi Indonesia, 2014:50-51). Tahun 2014 dicatat satu koma dua juta wisatawan medis datang ke negeri gajah putih. Sedangkan, Malaysia mencatat selam kurun waktu satu dasa warsa hingga 2011 pertumbuhan wisata medis mencapai delapan kali lipat dengan jumlah lebih dari setengah wisatawan medis berasal dari Indonesia. Singapura hingga tahun 2015 mencatat wisatawan medis lebih dari satu juta orang. Di lain pihak, Filipina yang mulai ikut memasuki kancah persaingan wisata medis masih berharap pertumbuhan sebesar sembilan persen dalam tiga tahun terahir hingga akhir 2015.

B. PAUD dan Dikmas dalam Konstelasi MEA

Menyoroti peranan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas),Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat ini sampai dengan lima tahun ke depan tidak dapat dilepaskan dari pilihan presiden ke delapan Republik Indonesia periode 2015 – 2019, yakni Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla. Terutama di bidang ekonomi, saat ini Indonesia mengalami surplus tenaga kerja sebanyak 20 juta tapi dengan kontribusi kecil terhadap *output*. Perpindahan tenaga kerja dari sektor informal dan pertanian menjadi tenaga kerja di sektor manufaktur yang padat karya akan meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta menghasilkan surplus dalam neraca perdagangan (Papanek, Raden Pardede dan Suahasil Nazara, 2014: ii).

Kondisi ekonomi yang dihadapi secara nasional dan harus bersinggungan dengan penetapan Masyarakat Ekonomi di tingkat kawasan merupakan tantangan nyata Ditjen PAUD dan Dikmas lima tahun mendatang untuk tetap memberikan kontribusi positif terutama bagi masyarakat di luar sekolah. Tentu saja apabila pendidikan diartikan *more than merely a process of learning*: *it is a process of learning and understanding knowledge, skill or attitude* (Rukmana,2006:17).

Apabila diorientasikan dengan waktu 'hidup' yang dijalani seseorang, dimana waktu senggang bukan lagi sisa waktu setelah digunakan bekerja, maka waktu senggang merupakan bagian dari waktu yang harus dikelola sama seperti dengan waktu bekerja. Terlebih jika waktu utama untuk bekerja bergeser menjadi waktu senggang sehingga

penggunaan waktu senggang memerlukan upaya pendidikan agar bermanfaat baik menguntungkan diri sendiri maupun masyarakat (gambar 1.5).

Gambar 1.5 Konsep Waktu Senggang

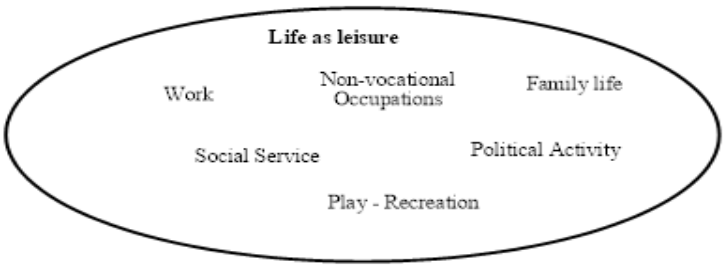

Sumber: Entwistle, 1979: 167 -170

Sebaran jumlah penduduk suatu kawasan dapat dibedakan antara penduduk di sekolah dan di luar sekolah. Penduduk di sekolah (*school community*) saat ini adalah mereka yang berusia wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (usia 7-16 tahun) dan mereka yang beruntung dan mampu melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi (17-26 tahun). Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang telah menuntaskan kewajiban belajar sembilan tahun dapat menyelesaikan pendidikan tinggi meraih gelar sarjana maupun paska sarjana.

Sebagian besar dari mereka yang lulus pendidikan dasar dan tidak dapat melanjtukan pendidikan lebih adalah anggota masyarakat di luar sekolah yang memerlukan kesempatan untuk belajar sebagai bagian dari '*adaptive mecahnism*' dalam membangun dan mengembangkan kompetensi menjawab tantangan kehidupan maupun peluang pekerjaan yang ditawarkan.Bercermin pada kenyataan pendidikan bagi masyarakat di luar sekolah, pada era 1980 di bawah nama pendidikan lanjutan yang diselenggarakan baik non formal dan melibatkan masyarakat melek aksara dijumpai ada tiga belas kegiatan, yakni:

Tabel 1.2
Types of Continuing Education in Indonesia
(*Post Literacy and Non Formal Education*

No	***Types***	***Learners***	***Objectives***	***Carry out by***
1	*Income Generating*	- *New Literates*	- *To improve*	*Ministry of Education and*

No	Types	Learners	Objectives	Carry out by
	Learning Group	- *Drop out from Secondary Education* - *Jobless*	*the income of learners* - *To create new job*	*Culture (MOEC) and others*
2	*Vocational Courses*	- *Drop out from Secondary Education* - *Graduate from junior and senior high school*	- *To improve their vocational skills*	*MOEC and Ministry of Manpower*
3	*Apprenticeship*	- *Drop out from Secondary Education* - *Graduate from junior and senior high school*	- *To improve their vocational skills* - *To create new job*	*MOEC and Ministry of Manpower*
4	*Youth Training*	- *Youth Leaders*	- *To improve their vocational skills* - *To train the leader of youth*	*Ministry of Education and Culture (MOEC)*
5	*Scout Leaders Training*	- *Scout Leader*	- *To improve the knowledge and skill of scout leader*	*IndonesianScout Movement*
6	*Farmers*	- *Farmers*	- *To*	*Ministry of*

No	Types	Learners	Objectives	Carry out by
	Learning Group		*improve the vocational skill of farming*	*Agriculture*
7	*Family Life Education Course*	- *New Literate women* - *Housewife* - *Women leader*	- *To improve their daily lives*	*Family Life Welfare Movement*
8	*Family Planning Group Members*	- *Housewife*	- *To improve the quality of life*	*Family Planning Coordination Board*
9	*Sports Training*	- *Community Sports Clubs*	- *To improve the community sports trainer*	*National Sport Committee*
10	*Training*	- *Community Sports Clubs Leader*	- *To improve the community clubs leader*	*National Sport Committee*
11	*Income Generating Learning Group for Women*	- *Housewife*	- *To improve the quality of life*	*Office of the Minister of Women Affairs*
12	*TV, Radio Broadcasting Learning Group*	- *Community*	- *To improve general knowledge and skill*	*Ministry of Information*
13	*Farmers*	*Landless*	- *To provide*	*Ministry of*

No	Types	Learners	Objectives	Carry out by
	Group on Plantation People	*Farmers*	*occupation in agriculture*	*agriculture*
Sumber : Napitupulu, 1989:182-183 (diadaptasi)				

Di era konsep kawasan terbuka dalam berbagai sektor di berbagai belahan dunia, maka batas antara satu negara dengan negara hanya dalam konteks teritorial saja. Sementara penyelenggaraan sistem ekonomi, pendidikan, perdagangan, industri dan jasa sudah tidak memiliki batas lagi. Sebuah kawasan negara yang menyepakati hubungan bersama secara regional dalam satu kawasan maka yang digunakan bukan lagi regulasi nasional tapi menjadi regulasi regional yang harus ditaati bersama.

Diberlakukannya perjanjian *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang berkembang menjadi *World Trade Organization* (WTO), dibentuknya blok-blok perdagangan regional seperti *European Common Market* (ECM) lalu menjadi *European Economics Community* (EEC), *North American Free Trade Area* (NAFTA), *Asean Free Trade Area* (AFTA), dan *Asia Pacific Economics Cooperation* (APEC) merupakan wujud nyata era perdagangan bebas, liberal, dan terbuka, termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mulai diberlakukan tanggal 31 Desember 2015. MEA merupakan komitmen untuk membentuk komunitas perdagangan yang terintegrasi diantara negara-negara yang tergabung menjadi anggota Asean seperti halnya yang telah terbentuk di negara-negara Eropa, melalui komunitas Uni Eropa, namun masih menggunakan mata uang sendiri-sendiri, belum bebas paspor, dan belum punya satu bank sentral, Tetapi ditandai dengan lima simbol kebebasan untuk melakukan persaingan pasar yaitu arus barang bebas, arus jasa bebas, arus investasi bebas, arus modal bebas, dan, arus tenaga kerja bebas.

Semua komponen bangsa mau tidak mau, harus mempersiapkan diri agar mampu beradaptasi dan berkompetisi dalam menghadapi dinamika yang akan terjadi pasca diberlakukannya MEA yang tentunya mengandung resiko dan konsewensi tersendiri terhadap tata kehidupan kita sebagai sebuah bangsa, karena pranata ekonomi merupakan komponen penting yang akan sangat berpengaruh terhadap terjadinya

perubahan pada sistem sosial budaya lainnya, termasuk pada sistem pendidikan. Seperti telah kita ketahui, sistem pendidikan kita terbagi menjadi pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Tentunya ketiga sistem pendidikan ini harus saling bahu membahu untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang mempunyai daya dukung dan daya lenting dalam menghadapi persaingan global yang akan terjadi di era MEA, terutama untuk menghadapi perubahan kebebasan arus tenaga kerja yang nantinya warga masyarakat negara Asean dapat dengan bebas mengisi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, termasuk di Indonesia.

Namun kekhawatiran kemudian muncul, terutama pada aspek kesiapan tenaga kerja Indonesia menurut *Asian Productivity Organization* (APO) sampai dengan tahun 2015 ini menunjukkan, dari setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia hanya ada sekitar 4,3% yang terampil, sedangkan Filipina 8,3%, Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7%. Hal ini tentu mencemaskan, dan apabila tetap stagnan maka dapat dipastikan tenaga kerja Indonesia akan kalah bersaing dengan tenaga kerja negara ASEAN lain. Ini artinya kita bisa menjadi tamu di negeri sendiri.

Beranjak dari sinilah kemudian kita dapat melihat betapa besar kontribusi pendidikan nonformal dan pendidikan informal untuk mempersiapkan SDM yang berdaya saing di Era MEA, secara jangka pendek adalah turut mempersiapkan SDM yang terampil dalam bidang jasa pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, telematika, dan transpotasi udara, serta sumberdaya daya yang terampil dalam sektor produksi pertanian, perikanan, karet, kayu, otomotif, elektronik dan tekstil, karena ke-12 sektor itulah yang menjadi kesepakatan arus bebas tenaga kerja pada tahap awal pelaksanaan MEA.

Namun tentunya, secara jangka panjang pendidikan nonformal dan pendidikan informal harus mampu menciptakan SDM yang bukan sebatas mempunyai keterampilan teknis untuk bersaing di era MEA, namun SDM yang mempunyai mental yang kuat, ahlak yang benar, dan wawasan yang luas sehingga tumbuh menjadi manusia yang mampu menjadi pemenang dalam persaingan yang terjadi sebagai dampak diberlakukannya MEA. Hal tersebut, berarti harus sudah mulai di persiapkan sejak usia dini dan diperkuat ketika memasuki masa remaja dan menginjak usia dewasa.

Di era konstalasi global paradigma baru bermunculan dalam bentuk dan dimensi yang berbeda. Dunia bisnis, industri dan jasa global akan semakin kompleks, dinamis dan bermunculan berbagai dikotomi kepentingan. Model pendidikan memiliki dua ranah besar yakni pengembangan *soft skills* dan *hard skills*. Kompetensi yang diharapkan terbentuk adalah "*hard competence*" kompetensi tentang bidang pekerjaan fungsional yang digeluti sesuai dengan bidangnya masing-masing. Aspek kedua adalah "*soft competence*" dimana seorang tenaga kerja yang dididik secara liberal, memiliki pemikiran yang terintegrasi, komunikator yang andal, cerdas emosional, mampu bekerja dalam tim dan beretika.

Besar kecilnya kontribusi pendidikan nonformal dan pendidikan informal dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing di era MEA, salah satunya tergantung dari usaha pemerintah untuk mempersiapkan dan mewujudkannya, dan melalui peran Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas-lah fungsi pemerintah tersebut dapat diaktualisasikan melalui penyelenggaraan program PAUD, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Kursus dan Pelatihan, serta Pendidikan Keluarga yang harus terbingkai dalam *mainstreams* pendidikan kerakter, pendidikan kewirausahaan, penguasaan teknologi dan informasi, serta penguasaan bahasa, terutama bahasa Inggris yang menjadi bahasa pemersatu secara global. Sebagai medium tentu harus dilakukan penguatan-penguatan secara kelembagaan terhadap lembaga-lembaga penyelenggara program PAUD dan Dikmas, serta sebagai katalisatornya tentu harus meningkatkan mutu para PTK yang kompeten dengan penyelenggaran program PAUD dan Dikmas, dari mulai pusat sampai daerah.

C. Fenomena dan masalah PAUD dan Dikmas saat ini

Lebih dari tiga puluh enam persen anak berusia tiga hingga enam tahun mengalami hambatan layanan di tahun ini berdasarkan proyeksi tahun 2014. Diperkirakan jumlah ini mencapai enam koma delapan juta anak dengan Angka Partisipasi Kasar PAUD kurang dari lima puluh persen ada di wilayah Papua (42,74%), Papua Barat (44,47%), Nusa Tenggara Timur (47,85%), Maluku (47,70%), Maluku Utara (49,07), dan Kalimantan Timur (45,11%).

Penduduk tuna aksara sendiri hingga 2014 menyisakan jumlah sebanyak 6,1 juta orang yang didominasi oleh perempuan mencapai dua pertiga bagian. Pencapaian pemberantasan tuna aksara dianggap mampu menurunkan hingga 60 % dibandingkan keadaan sepuluh tahun silam. Kondisi yang jamak dijumpai pada penduduk tuna aksara adalah kemiskinan sehingga selain tuna aksara isu yang turut menyertai adalah intensitas penggunaan bahasa ibu dan budaya daerah yang kental.

Hingga tahun 2005, diperkirakan masih kurang dari sembilan puluh persen angka usia sekolah wajib belajar sembilan tahun yang dapat mengenyam jenjang sekolah lanjutan pertama, hampir dua puluh persen mereka adalah kategori masyarakat luar sekolah, sekitar lima belas persen adalah peserta program kesetaraan (Grafik 1.3).

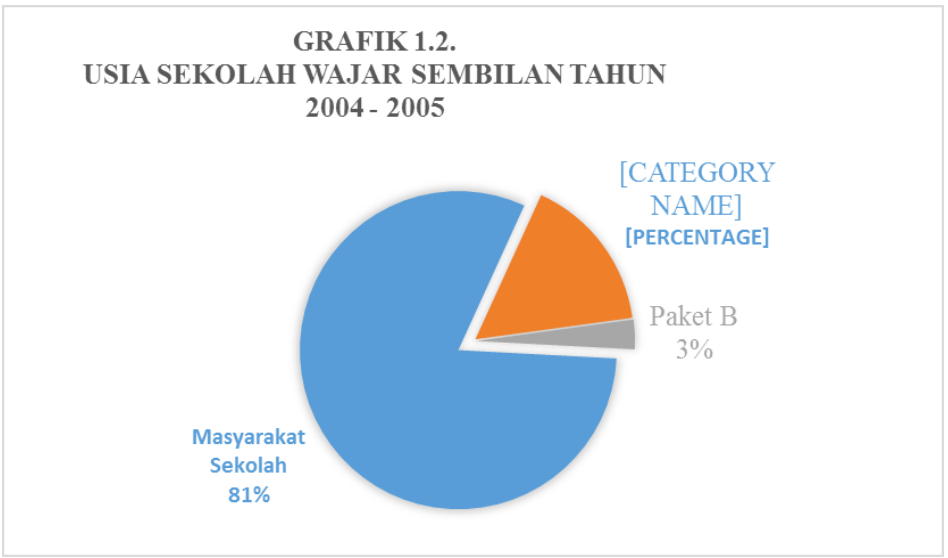

Grafik 1.3 Peserta Program Pendidikan Nonformal

Catatan kondisi tenaga kerja hingga 2014 penduduk berusia 15 – 29 tahun yang bekerja menunjukkan sekitar 9,6 juta berpendidikan sekolah dasar. Sedangkan dari hampir 6,4 juta pencari kerja dengan kategori umur yang sama, lulusan SD dan SMP mencapai 40,21 %, lulusan SMA/SMK berkisar 48 % dan lulusan perguruan tinggi sebesar 11,73%.

Dalam konteks dan pengembangan budaya lokal dapat diproyeksikan relasi bentuk terhadap pendidikan kecakapan hidup yang bermanfaat menopang kecakapan kerja (Gambar 1.6.). Perhatian atas

kontribusi budaya lokal masih dibatasi sebagai pemahaman terhadap potensi pariwisata dan turunan kegiatan yang menyertainya.

Gambar 1.6 *Roadmap* Pendidikan Keaksaraan

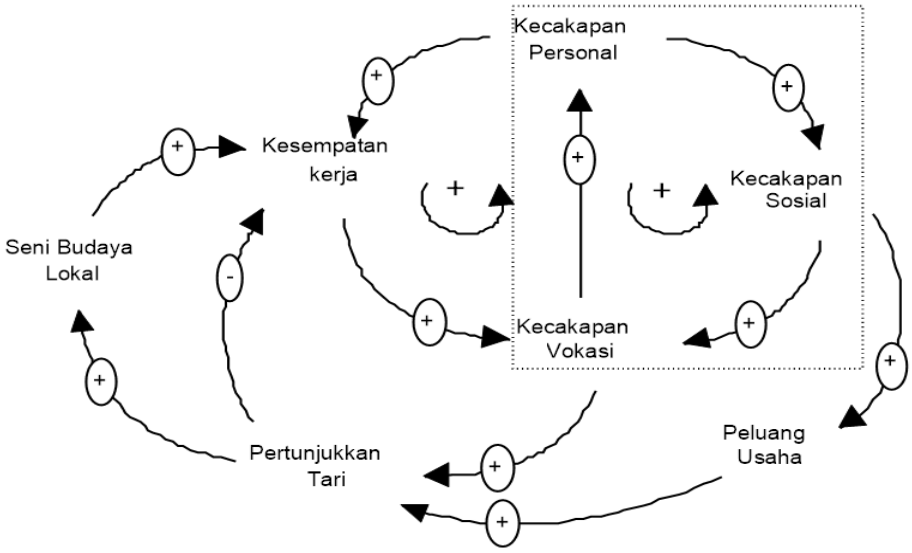

Berdasarkan besaran program primadona penyelenggara PNF dan secara massif merupakan andalan pemerintah, dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Pendidikan Keaksaraan

Di tengah keberhasilan penuntasan penduduk buta aksara nasional masih menyisakan sembilan provinsi berpenduduk buta aksara di atas 200 ribu orang. (lihat tabel 1.3)

Tabel 1.3
Sembilan Provinsi dengan Penduduk Buta Aksara di atas 200 ribu jiwa

No	Provinsi	Penduduk Buta Aksara
1	Sumatera Utara	210.127 orang
2	Lampung	236.797 orang
3	Papua	243.768 orang
4	Bali	257.206 orang

No	Provinsi	Penduduk Buta Aksara
5	Nusa Tenggara Barat	350.849 orang
6	Sulawesi Selatan	520.247 orang
7	Jawa Barat	870.115 orang
8	Jawa Tengah	1.568.111 orang
9	Jawa Timur	2.531.237 orang

Di beberapa daerah terutama sembilan provinsi pada tabel di atas, tentu penuntasan penduduk buta aksara mendatangkan beban biaya penyelenggaraan program keaksaraan dasar dan beban psikologis menyandang daerah berpenduduk buta aksara. Kesempatan menjadi terbatas bagi penduduk buta aksara dalamberperan aktif dalam pembangunan, seperti pemilih aktif hingga memanfaatkan fasilitas pembangunan yang mensyaratkan kemampuan aksara.

Sehingga bagi sembilan provinsi ini, keaksaraan dasar dapat menjadi prioritas program PNF, sehingga hasil program yang dicapai secara statistik adalah penerbitan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) sebanyak jumlah penduduk buta aksara dan telah menyelesaikan jangka waktu 144 jam pembelajaran.

Bagi provinsi lain, program keaksaraan dapat menetapkan layanan paska keaksaraan dasar seperti Keaksaraan Usaha Mandiri dan Multi Keaksaraan mencakup keaksaraan kewirausahaan, keaksaraan kritis, keaksaraan lingkungan, keaksaraan media, keaksaraan bencana, dan keaksaraan perdamaian2. Hanya diperlukan kemauan kuat dan semangat tinggi dalam menyusun serta menjalani "*roadmap*" pendidikan keaksaraan.

2. Pendidikan Kesetaraan

Beberapa tahun terakhir ini, pengelolaan pendidikan kesetaraan berada di bawah kendali sekolah di jalur pendidikan formal. Pelaksanaan hingga saat ini, ditengarai masih belum berjalan seperti diharapkan. Tentu saja ini lebih disebabkan oleh teknis di lapangan yang mengabaikan karakteristik *out-of-school community* (Call Institute, 2013), sedangkan sekolah kental dengan karakteristik penduduk

sekolah dengan perlakuan belajar yang kurang memperhatikan struktur pengalaman peserta didik.

Integrasi pengelolaan kesetaraan melalui jalur formal, diharapkan dapat meningkatkan prevalensi koefisien lama sekolah. Karenaselama ini, lulusan penyelenggaraan equivalency non formal basic education belum dikalkulasi menjadi suplemen pada koefisien pencapain lama sekolah.

3. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH/ *Life Skills Education*)

Kategori pendidikan ini muncul di tengah kenyataan banyak generasi muda yang berada dalam kelompok usia produktif untuk bekerja tidak memiliki kesempatan, karena peluang kerja terbatas. Padahal kelompok usia ini memiliki kapasitas fisik dan intelektual, bahkan banyak yang sia-sia tidak mendapat perhatian, sehingga diperlukan panduan dan motivasi agar tidak menjadikan mereka masalah sosial.

Kecakapan hidup menurut model Targeting Life Skills (TLS) yang dikembangkan Hendricks adalah *skills that help an individual be successful in living a productive and satisfying life*. Berdasarkan batasan ini Badan Kesehatan PBB mengartikan kecakapan hidup sebagai *the abilities for adaptive and positive behavior that enable individual to deal effectively with demands and challenges every day life* (Francis, 2012).

Oleh karena itu, PKH menekankan pada kecakapan berpikir, kecakapan sosial dan kecakapan negosiasi untuk membantu pemuda berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. PKH merupakan program yang memberikan nilai tambah bagi pemuda untuk memahami dan mengukur kecakapan, kemampuan dan kebutuhan perkembangan diri mereka sehingga dapat memberikan kontribusi produktif.

Varian program PKH disadari tidak memiliki interaksi langsung terhadap koefisien parameter capaian IPM. Akan tetapi, akibat negatif program PKH yang diterlantarkan dapat memberikan imbas tidak diharapkan antara lain terhadap parameter kesehatan bahkan pendapatan per kapita.

4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penelitian Elizabeth Pungello (Siscawaty, 2012) menunjukkan hasil positif kelompok responden yang mengikuti PAUD setelah tiga puluh tahun. Responden selain secara akademis rata-rata berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi, juga memperlihatkan kemampuan kerja yang konsisten.

Keberhasilan responden setelah tiga puluh tahun, berdasarkan penelitian ini dilihat sebagai asosiasi terhadap pengalaman pendi dikan anak usia dini. Untuk itu, dalam menyongsong kebangkitan dan menghantarkan seratus tahun kemerdekaan Republik Indonesia, PAUD menjadi pilihan strategis memp ers iapkan generasi untuk tiga puluh tahun mendatang. PAUD tidak memiliki korelasi langsung terhadap pencapaian dan peningkatan IPM, namun secara potensial memberikan dukungan jangka panjang atas pencapaian derajat IPM.

5. Pendidikan Kepemudaan

Pendidikan ini memusatkan pada karakteristik sasaran peserta didik yaitu pemuda. Banyak ragam program dan kelembagaan yang menyelenggarakan pendidikan bagi pemuda. Penyelenggara pendidikan kepemudaan ini tidak identik sebagai instansi di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Andaikata instansi maupun lembaga yang ada benar menyelenggarakan pendidikan kepemudaan, tentu norma dan acuan penyelenggaraan pendidikan harus mendapat perhatian antara lain pemenuhan delapan standar nasional pendidikan.

Terlepas dari pemenuhan norma dan acuan penyelenggaraan, hasil pendidikan kepemudaan tidak dapat memberikan sumbangan langsung terhadap pencapaian dan peningkatan IPM. Seperti hasil penyelenggaraan PAUD, pendidikan kepemudaan pun hanya mampu menunjukkan potensi jangka panjang atas pencapaian IPM. Kecuali apabila pendidikan kepemudaan memiliki muatan yang serta merta langsung berkaitan dengan koefisien parameter IPM, seperti kesehatan, dan peningkatan pendapatan.

6. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Sasaran pendidikan ini mengutamakan perempuan, terutama mereka yang telah berkeluarga dan memiliki anak dan tinggal di daerah pedesaan, terpencil atau tertinggal. Karakteristik program pendidikan ini

lebih banyak menawarkan materi kesehatan dan peningkatan pendapatan keluarga sehingga dapat dikalkulasi memiliki kontribusi terhadap pencapaian dan peningkatan IPM. Namun, harus dipahami bahwa penyelenggaraan pendidikan pemberdayaan perempuan kerap kali berada di luar kendali instansi/lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, sumbangan hasil pendidikan pemberdayaan perempuan terhadap IPM tidak mudah diklaim sebagai kontribusi PNF.

D. Tantangan dan Peluang PAUD Dikmas dalam MEA

Indonesia berdasarkan catatan Statistik BPS (April, 2013) memiliki 80.714 desa/kelurahan. Sementara berdasarkan jumlah kodepos dijumpai 81.248 desa / kampung/ pekon/ kelurahan di Indonesia. Diperkuat dengan kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menyaadari penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah propinsi lebih pada kepentingan koordinasi, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/ kota justru pada mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan local (Depdiknas, 2009).

Penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong justru melekat dengan keberadaan desa/ kampung/ pekon/ kelurahan sebagai sebuah entitas. Sehingga di tingkat desa dapat dikembangkan secara optimal perangkat kebijakan yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian program maupun dalam penggerakan sumber daya Pendidikan masyarakat, terutama jalur pendidikan nonformal (Hardiyanto,2015:13).

Penguatan program di tingkat perdesaan akan memberikan imbas bagi penguatan di tataran nasional terutama dalam menangkal dampak negatif yang ditimbulkan keterbukaan MEA antara lain akibat pasar dan komersialisasi yang masuk, merubah hubungan *patron-klien* menjadi hubungan ekonomis majikan-buruh (berdasarkan upah) (Shahab, 2007:12).Penyelenggaraan program Pendidikan non formal di perdesaan seperti dalam mitigasi bencana membuktikan dapat menyegarkan masyarakat terhadap manfaat gotong royong yang diartikan Kono Masanori (2009:25) *a spirit of mutual helpthat brings outeach person's abilities*.

Kebutuhan pendidikan nonformal dalam pembangunan perdesaan di era MEA, disinggung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam ASEAN *Enterpreneurship Summit* 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu 21 Nopember 2015 melalui strategi membangun industri di Purwakarta dengan mempertahankan identitas desa (Pikiran Rakyat,2015:14).

Di lain pihak, determinan yang menentukan keberhasilan pembangunan justru berada pada kombinasi aspek otosentris:

1. Pembentukan identitas dari individu kolektif dan kultur politik keseluruhan,
2. Kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan sendiri politik, masyarakat, ekonomi dan budaya,
3. Pengembangan tenaga produktif yang bermacam-macam di semua sector yang penting; pertanian, industry barang produksi, penemuan dan produksi teknologi, industri barang konsumsi masal, sektor jasa swasta dan negara,
4. Pertukaran dengan kesatuan sosial diluar batas daerah sendiri. (Senghass, 1988:359)

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan termninologi baru yang dikenal dalam kelompok negera-negara Asia Tenggara. MEA merupakan upaya baru kelompok negara ASEAN dalam meningkatkan daya saing perekonomian dunia. MEA lebih mengarah pada kebersamaan dalam menggerakan ekonomi secara bersama-sama sehingga mengundang investor raksasa menanamkan investasinya lebih besar di kawasan ini.

Walaupun MEA menjungjung tinggi kebersamaan ekonomi, tapi bukan berarti tanpa persaingan antara sesama negara MAE tersebut. Persaingan akan terjadi secara kompetitif dalam pemgembangan sumber daya manusia terutama di sektor pendidikan, termasuk pendidikan teknologi dan kejuruan. Oleh karena itu perlu inovasi pendidikan berbasis isu global yang akan memberikan wawasan luas, peningkatan kompetensi lulusan dan sikap professional yang lebih kuat.

1. Isu global tenaga kerja

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2105 akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang. Persaingan lulusan dengan kompetensi global menjadi syarat mutlak memamsuki MEA 2015. Sementara itu Isu kontraproduktif terkait tingkat

pengangguran usia produktif yang tinggi dan luas serta diperburuk oleh krisis ekonomi global menjadikan stabilitas nasional suatu negara menjadi goyah.

Dibalik kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, ada sedikit harapan terjadinya pertumbuhan ekonomi cukup signifikan yang dapat menekan tingkat pengangguran. Sebagai contoh, antara tahun 1999 dan 2008, GDP global meningkat sebesar 47 persen, namun pengangguran global menurun hanya 0,7 persen, dari 6,4 persen menjadi 5,7 persen. Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan *International Institute for Labour Statistics* (IILS) menunjukkan bahwa analisis optimis di bawah di perkiraan pertumbuhan saat ini, pertumbuhan lapangan kerja di negara maju diperkirakan tidak akan pulih ke tingkat sebelum krisis sebelum setidaknya 2016.

Menurut *Global Employment Trends* laporan ILO 2012, dunia menghadapi 'tantangan yang mendesak' menciptakan 600 juta lapangan kerja produktif selama dekade berikutnya untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan mempertahankan kohesi sosial. Ketidakcocokan penawaran dan permintaan keterampilan sering ditekankan oleh para pembuat kebijakan sebagai alasan utama penyebab pengangguran usia produktif yang tinggi dan transisi yang sulit dari sekolah untuk bekerja. Namun tiap negara memiliki tantangan berbeda yang harus dihadapi dalam penawaran dan permintaan keterampilan.

Di beberapa negara, tingkat pengangguran yang tinggi umumnya

berdampingan dengan keterampilan yang rendah, sementara di sisi lain dalam populasi keterampilan tinggi berjuang menemukan peluang kerja yang memadai. Perhatian kebijakan mengenai ketidakcocokan keterampilan lebih diperparah oleh meningkatnya permintaan dari perusahaan untuk lulusan pendidikan teknologi kejuruan dengan keterampilan lebih relevan. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa investasi pendidikan sebagai kegiatan inti pengembangan SDM dan pengembangan tenaga kerja terbukti telah memiliki sumbangan yang signifikan terhadap keuntungan ekonomi.

2. Isu global perkembangan teknologi

Perubahan paradigma akibat perkembangan teknologi termasuk salah satu faktor yang akan berpengaruh besar kepada Masyarakat Eekonomi Asean. Seperti kita fahami sejarah evolusi teknologi ditandai oleh gelombang inovasi berdasarkan sumber tertentu energi dan jenis penemuan. Meskipun dampaknya bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tapi gelombang inovasi memiliki implikasi langsung untuk bagaimana masyarakat menghasilkan kekayaan dan dapat meningkatkan standar hidup. Sebagai gelombang berturut-turut inovasi mengambil alih, rentetan waktu menunjukkan bahwa durasi relevansi menjadi lebih pendek.

Dengan kata lain, periode antara munculnya teknologi baru, pengaruh utama mereka dan penggantian mereka dengan teknologi baru, adalah mengurangi panjang dan membuat teknologi yang lebih tua dan usang lebih cepat daripada yang terjadi dengan gelombang inovasi

sebelumnya. Kemajuan teknologi yang pesat ini menyiratkan perlunya tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pengetahuan khusus dan keterampilan, tetapi telah mengembangkan keterampilan generik yang diperlukan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru yang muncul.

3. Isu global kebutuhan khusus

Satu gelombang baru interaksi masyarakat di era globalisasi diharapkan dapat mencerminkan tatanan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 yang bersifat multipolar. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan kekhawatiran tentang utang negara yang tinggi, dinamika kurs mata uang dan pengangguran terus membayangi krisis ekonomi global. Dari perspektif regional, pembangunan ekonomi terus berlangsung dan tidak merata di tiap negara. Ada yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi namun di beberapa negara sangat rendah. Mengingat keterampilan memiliki peran sentral dalam menentukan kapasitas suatu negara di era globalisasi, maka kebijakan pendidikan teknologi kejuruan dapat memainkan peran penting dalam membantu perekonomian yang ada dan merata di semua negara.

Memperluas partisipasi dalam pembelajaran pendidikan tekologi kejuruan berpotensi dapat mendukung globalisasi yang lebih inklusif yang memungkinkan lebih banyak individu dan masyarakat mereka untuk mendapatkan keuntungan. Keterampilan yang berubah dengan cepat persyaratan dalam konteks globalisasi telah diperkuat peran pendidikan teknologi kejuruan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing, yang pada gilirannya dapat mendukung terciptanya kesempatan kerja. Akibatnya, lebih banyak negara saat ini membutuhkan tenaga kerja lengkap dan terus diperbarui dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang tidak dapat diperoleh melalui pendidikan dasar saja.

4. Isu global pembangunan berkelanjutan

Eksplotasi secara besar-besaran pada sumber daya alam, lingkungan dan iklim menimbulkan dampak besar terhadap pemanfaatan energi dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Konsep ekonomi hijau menyiratkan perubahan keterampilan kebutuhan sebagai industri baru dan pekerjaan muncul, di samping profil keterampilan baru dalam banyak pekerjaan yang ada, hal ini mempengaruhi kebutuhan pelatihan

dan pengiriman tenaga kerja.

Dalam menanggapi isu-isu pembangunan berkelanjutan, pendidikan teknologi kejuruan harus mampu beradaptasi dengan perubahan tuntutan ekonomi dan sosial dengan menciptakan peluang pembelajaran pendidikan teknologi kejuruan relevan bagi orang muda dan orang dewasa sepanjang hidup mereka, namun tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan menekankan pendekatan holistik, adil dan berpandangan jauh ke depan dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan. Ini menekankan bukan hanya kinerja ekonomi yang kuat tetapi antar generasi. Ini didasarkan pada integrasi dan pertimbangan yang seimbang dari tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan dan tujuan baik dalam pengambilan keputusan publik dan swasta. Dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang luas ini, ada perhatian khusus untuk hubungan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan, dan konsep 'ekonomi hijau' dan 'masyarakat hijau'.

Pendidikan untuk Pembangunan memiliki karakteristik yang bisa diterapkan dalam beragam bentuk budaya yang sesuai dengan

karakteristik berikut:

a. Mendasarkan diri pada prinsip dan nilai yang melandasi pembangunan berkelanjutan.
b. Bersentuhan dengan tingkat kesejahteraan empat dimensi keberlanjutan-lingkungan, masyarakat, kebudayaan dan ekonomi.
c. Menggunakan beragam teknik pedagogi yang mengembangkan pembelajaran partisipatori dan kecakapan berpikir tinggi.
d. Mengembangkan belajar seumur hidup.
e. Sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat.
f. Berdasarkan kebutuhan, persepsi dan kondisi lokal, tetapi kerap pemenuhan kebutuhan lokal memiliki pengaruh dan efek global.
g. Melibatkan pendidikan formal, nonformal dan informal.
h. Mengakomodasi sifat khas keberlanjutan.
i. Bermuatan konteks, isu global dan prioritas lokal.
j. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membuat keputusan berbasis masyarakat,toleransi sosial, dukungan lingkungan, dan tenaga kerja yang adaptif serta kualitas kehidupan yang baik.
k. Merupakan garapan interdisiplin. Tidak ada disiplin yang sendiri mengaku PPB, semua disiplin mendukung PPB.
l. Karakteristik inti PPB bisa dipraktekkan dalam beraam cara, sehingga program PPB merefleksikan lingkungan kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang unik di setiap lokasi. Selanjutnya, PPB meningkatkan kapasitas masyarakat dengan mengembangkan dan memperbaiki masyarakat melalui penggabungan pendidikan formal, nonformal dan informal.

Karakteristik inti PPB bisa dipraktekkan dalam beraam cara, sehingga program PPB merefleksikan lingkungan kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang unik di setiap lokasi. Selanjutnya, PPB meningkatkan kapasitas masyarakat dengan mengembangkan dan memperbaiki masyarakat melalui penggabungan pendidikan formal, nonformal dan informal.

MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

CONNECTING PEOPLE

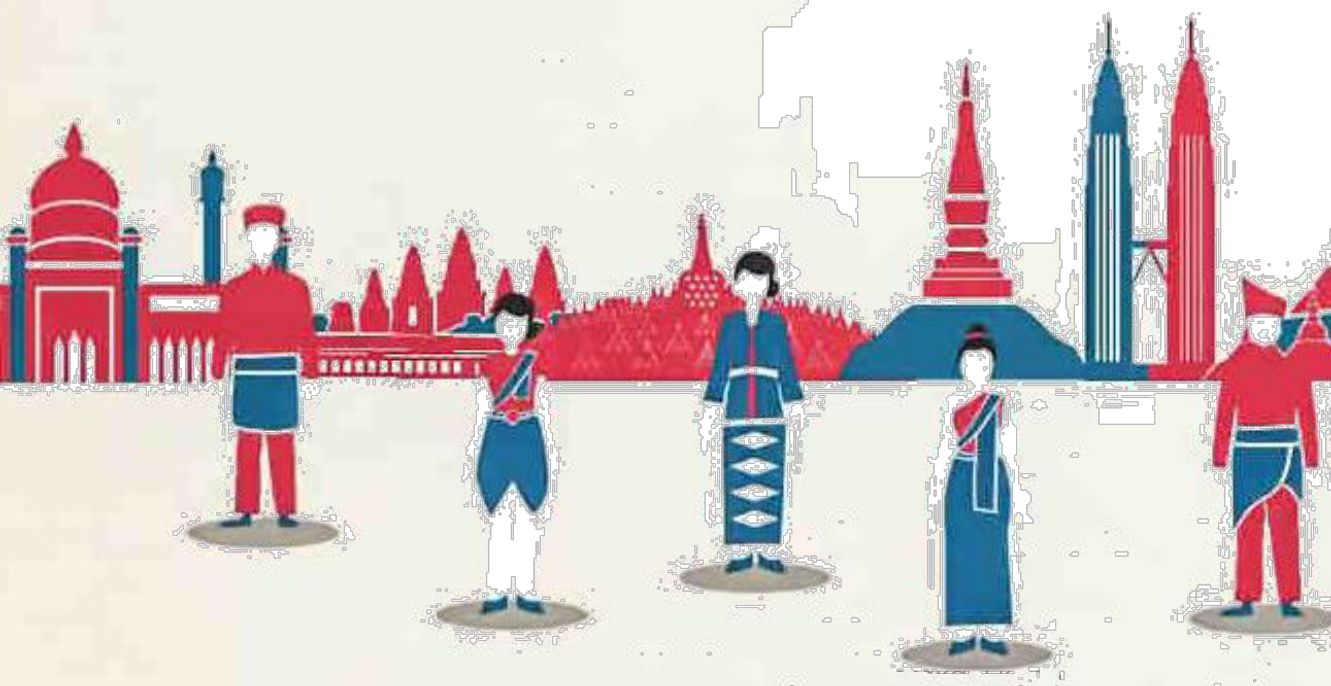

BAB II

KEDUDUKAN, WEWENANG PAUD DAN DIKMAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL PAUD DAN DIKMAS

A. Kedudukan

Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan tiga jalur, yakni pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Penyelenggaraan ketiga jalur pendidikan ini ditegaskan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang mendahulukan pendidikan formal (Pasal 13-25) sebelum pendidikan nonformal (pasal 26) dan pendidikan informal (Pasal 27).

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan (Pasal 1 butir 7) terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (Pasal 13 Ayat 1).

Penyelenggaraan setiap jalur pendidikan memperhatikan prinsip, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa(Pasal 4 Ayat 1); satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna (Ayat 2); suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (Ayat 3); diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (Ayat 4); diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat (Ayat 5); dan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Ayat 6).

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 16).

Sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multy exit system*). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan

dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup (Penjelasan Pasal 4 ayat 2).

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (Pasal 1 Butir 10).

1. Pendidikan Informal (PIF)

Berdasarkan UUSPN, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Pasal 1 Butir 13). Kegiatan pendidikan informal berbentuk kegiatan belajar secara mandiri (Pasal 27, Ayat 1). Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (Pasal 27, Ayat 2).

Dalam keluarga pun sebenarnya telah terjadi proses pendidikan, dan tentu saja sistem pendidikan yang digunakan berbeda dengan sistem sekolah dengan peraturan yang ketat dan tegas. Orang tua adalah pendidik kodrati (Joesoef dan Slamet,1981:4) yang tidak sekedar merawat serta memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, tetapi bersamaan dengan itu juga membesarkannya (atau mendidiknya) agar

mereka kelak menjadi orang dewasa yang tidak tercela. Pendidikan informal dalam keluarga seperti ini sudah dipraktekkan pada zaman Romawi Lama.

Pendidikan ini tidak menjadi tugas negara, tetapi diselenggarakan oleh keluarga (Ahmadi,1975:93). Sebelum seorang anak menjadi murid di sekolah, mereka telah memberikan pendidikan yang diberikan oleh keluarganya terutama ayah dan ibunya (Joesoef dan Slamet,1981:3). Anak-anak banyak belajar di rumah dari ibunya atau orang tuanya dimana dan kapan saja serta menyangkut berbagai hal. Di kemudian hari orang tua tidak lagi menjadi sumber ilmu, perkembangan dan kemajuan teknologi menambah peran TV, media massa dan akses multimedia menjadi sumber ilmu tempat kita mendasarkan pengajaran (Wen, 2003:47). Proses pendidikan dalam keluarga itu tanpa dibuat-buat, tetapi terjadi dengan wajar, sifatnya akrab dan hangat karena dasar pergaulan dalam keluarga adalah kasih sayang yang tidak dibuat-buat, lahir dengan sendirinya (Suardi, 1983:27). Pendidikan ini memiliki peran dan fungsi strategis karena dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan formal dan nonformal (Casmat,2009:14).

Meskipun pendidikan informal mendapat pengakuan hukum, memiliki peran dan fungsi strategis namun praktek penyelenggaraan program dan terutama pengakuan atas satuan pendidikan informal serta hasil belajar belum mendapatkan tempat seperti yang diharapkan.

2. Pendidikan Formal (PF)

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Pasal 1 Butir 11 dan Pasal 14). Pendidikan dasar merupakan jenjang yang melandasi pendidikan menengah (Pasal 17 Ayat 1), berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 17 Ayat 2). Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar (Pasal 18 Ayat 1), terdiri atas pendidikan menengah umum dan kejuruan (Pasal 18 Ayat 2), berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 18 Ayat 3). Pendidikan tinggi merupakan pendidikan setelah menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan perguruan

tinggi (Pasal 19 Ayat 1) yang diselenggarakan dengan sistem terbuka (Pasal 19 Ayat 2).

Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas (Pasal 20 Ayat 1) yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2) serta dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi (Pasal 20 Ayat 3). Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya (Pasal 21 Ayat 1). Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi dan vokasi (Pasal 21 Ayat 2). Pelanggaraan atas dua ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan (Pasal 21 Ayat 5).

Gelar akademik, profesi atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi (Pasal 21 Ayat 3). Penggunaan gelar akademik, profesi dan vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan (Pasal 21 Ayat 4). Sedangkan gelar yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan tidak mengindahkan ayat 1 dan 2, dinyatakan tidak sah (Pasal 21 Ayat 6).

Universitas, institut dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doktor honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan atau seni (Pasal 22). Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi (Pasal 25 Ayat 1). Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya (Pasal 25 Ayat 2), ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 25 Ayat 3).

Pada universitas, institut dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau professor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 23 Ayat 1). Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi (Pasal 23 Ayat 2).

Penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan (Pasal 24 Ayat 1).

Perguruan tinggi memiliki otonomi mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 24 Ayat 2). Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik (Pasal 24 Ayat 3).

Ketentuan mengenai pendidikan formal lebih banyak diorientasikan pada satuan pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi dibandingkan pendidikan dasar dan menengah, terutama pada gelar akademis, dan otonomi kelembagaan.

3. Pendidikan Nonformal (PNF)

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Pasal 1 Butir 12). Diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (Pasal 26 Ayat 1) serta berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (Pasal 26 Ayat 2).

Kategori PNF meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik(Pasal 26 Ayat 3). Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (Pasal 26 Ayat 5). Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional (Penjelasan Pasal 26 Ayat 5).

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan

majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis (Pasal 26 Ayat 4). Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan(Pasal 26 Ayat 6).

Fungsi mengembangkan potensi peserta didik pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (Pasal 26 Ayat 2) ini tidak secara jelas dapat ditemukan dalam jalur pendidikan formal. Sehingga untuk kepentingan pendidikan sepanjang hayat, penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, seorang anggota masyarakat dengan demikian mutlak perlu mengenyam layanan jalur pendidikan nonformal.

Isi pasal 26 ayat 5 seharusnya dapat menjadi bagian ayat tiga sehingga ditulis lengkap menjadi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan.

Jalur pendidikan formal mengenal jenjang (Pasal 14) terdiri atas pendidikan dasar (Pasal 17), pendidikan menengah (Pasal 18), dan pendidikan tinggi (Pasal 19-25) sementara PNF dikatakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Pasal 1 Butir 12). Sehingga jenjang dalam PNF tidak tegas seperti jalur PF.

Antara PF dan PNF terdapat ciri persamaan serta perbedaan, keduanya diselenggarakan sama untuk melengkapi dan menyempurnakan proses pelajaran pendidikan informal, serta memiliki bentuk dan metode sama. Perbedaan terletak pada pelaksanaan, peraturan kelembagaan, tujuan pendidikan dan golongan penduduk yang dilayani.

Lingkup dan komponen standar nasional pendidikan tidak mencantumkan standar pendidik(Pasal 35 Ayat 1), sementara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (PPSNP) meliputi komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 2 Ayat 1).

Pelaksanaan pendidikan informal melalui keluarga dan lingkungan serta pelaksanaan PNF menunjukkan kenyataan berbeda dengan pendidikan formal melalui sekolah dan perguruan tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian lebih banyak. Pelaksanaan yang dipaparkan di bawah ini adalah program-program PNF yang dikoordinasikan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Departemen Pendidikan Nasional, berdasarkan atasUUSPNyakni: PKH, PAUD, kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, keaksaraan, pendidikan keterampilan dan kesetaraan.

a. Pendidikan Kecakapan Hidup (*life skill*)

Pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) menurut penjelasan UUSPN Pasal 26 ayat 3 adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009 menyelenggarakan program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) kerjasama SMK/Politeknik/BLK/Perguruan Tinggi berupa pendidikan

vokasi/keterampilan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dan/atau usaha mandiri dengan tujuan: memberikan kesempatan peserta didik usia produktif disekitar SMK/Politeknik/BLK/Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pengetahuan,keterampilan dan sikap mental sesuai dengan kebutuhan/peluang pasar kerja dan/atau berusaha mandiri; serta memberikan peluang bagi SMK/ Politeknik/BLK/PerguruanTinggi untuk berpartisipasi dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2009:3).

b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) dimaksudkan sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut (UUSPN Pasal 1 butir 14).

Menurut penjelasan Pasal 28 ayat 1, pendidikan anak usia dini bukan merupakan prasyarat mengikuti pendidikan dasar. Namun tidak dapat diabaikan jika pengalaman pra sekolah memiliki pengaruh signifikan atas prestasi belajar (Mulyana, 2004:53-54). Untuk itu, kurikulum PAUD dapat mengembangkan bahasa dan keaksaraan (Anas

dkk,2008:11) serta disarankan mengembangkan inisiatif, hubungan sosial, produk kreatif, musik dan tari, matematika dan ilmu pengetahuan (Sofia Hartati dalam Anas dkk, 2008:21).

Penyelenggaraan PAUD merupakan ujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat internasional untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak,sebagaimana dituangkan dalam: *Convention on the Rights of the Child,* tahun 1948; *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*(*CEDAW)* - 18 Desember 1979; *United Nations Millenium Declaration* tahun 2000; *World Fit For Children* tahun 2002; *The Dakar Framework for Action*, tahun 2002 tentang pendidikan untuk semua (Ditjen PNFI, 2009). Bentuk layanan perawatan dan pendidikan anak usia dini selama ini baik melalui berbagai lembaga pemerintah maupun masyarakat, adalah 1) Taman Kanak-Kanak (TK);2) Raudatul Athfal (RA); 3) Kelompok Bermain; 4) Taman Penitipan Anak (TPA); 5) Bina Keluarga Balita (BKB); 6) Posyandu, atau bentuk lain yang sederajat.

c. Pendidikan Kepemudaan

Pendidikan Kepemudaan berdasarkan penjelasan UUSPN Pasal 26 ayat 3, diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/ kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan,

kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan. Contoh gambaran pendidikan kepemudaan seperti ini telah dilakukan Kabupaten Bondowoso-Jawa Timur yang tahun 2002 mendapat penghargaan Presiden Republik Indonesia atas keberhasilan pendidikan luar sekolah. Di Kabupaten Bondowoso memperlihatkan pendidikan kepemudaan menjadi satu dengan keberadaan induk organisasi kepemudaan (Mashoed, 2003:12). Pendidikan kepemudaan dapat disebut sebagai *non college-bound adolescent activity level in terms of recreation, jobs, and nonschool-sponsored education* (Darkenwald dan Knox, 1984:30-31).

d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pendidikan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan umum dan keterampilan teknis, keadilan dan kesetaraan gender, serta diarahkan meningkatkan peran perempuan dalam setiap aspek kehidupan sebagai mitra sejajar laki-laki (Direktorat Pendidikan Masyarakat, 2007:5). Pendidikan pemberdayaan perempuan sekaligus merupakan ujud ratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang dinyatakan melalui UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

e. Pendidikan Keaksaraan

Pendidikan Keaksaraan berkenaan dengan pengetahuan dan kemampuan dasar budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat (UUSPN, Pasal 4 Ayat 5). Pendidikan ini pada masa kemerdekaan dikenal dengan 'kursus ABC', tahun 1964 dinamakan Pemberantasan Buta Huruf (PBH), tahun 1978 dikemas menjadi program kelompok belajar (Kejar) Paket A dan sesudah itu tahun 1995 menjadi Keaksaraan Fungsional (KF) sebagai pendekatan untuk mengembangkan kemampuan dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar (Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2002:1-3).

Makna keaksaraan menurut Thomas Friedman telah berkembang menjadi kemampuan mencari informasi, secara kritis mengolah, menilai dan mengelolanya (dalam dunia digital) untuk kebermaknaan bagi dirinya dan berbagi dengan orang lain. Sehingga dibedakan antara *keaksaraan dasar* dan *keaksaraan keluarga* termasuk *keaksaraan usaha mandiri* (Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, 2009a:29). Pendidikan keaksaraan ini dapat mewakili kebutuhan *revolution, reform, maintenance and conservation* (Jones, 1988:47).

Sasaran pendidikan keaksaraan pada akhir Agustus 2008 mencapai 10,16 juta orang (6,22 persen) dari jumlah penduduk buta huruf tersebut, 65 persen adalah wanita. (Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, 2009b:16). Sedangkan menurut BPS pada tahun 2009 proporsi angka melek huruf penduduk berumur 10 tahun ke atas mencapai 93,05 persen.

Penyelenggaraan keaksaraan Paket A buku A1-A20 lebih merupakan revolusi dan reformasi cara belajar untuk mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Sedangkan Paket A buku A21-A60 dan A61-A100 secara fungsional lebih menekankan pada upaya pemeliharaan dan konservasi keaksaraan sesuai bidang kehidupan dan pekerjaan peserta didik.

f. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dalam penjelasan UUSPN Pasal 26 Ayat 3 dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk ini Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, mendorong Kursus Wirausaha Desa (KWD), Kursus Wirausaha Kota (KWK), Kursus Para Profesi (KPP), Kursus Wirausaha Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan (KWLK), kewirausahaan

melalui Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), kewirausahaan melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3). Selama tahun 2008 KWD, KWK, KPP, PKH SMK dan Poltek telah mendidik 246 ribu peserta didik dengan beragam keahlian baik untuk menjadi pekerja mandiri maupun pekerja tak mandiri (Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, 2009c:9).

Menurut *Center for International Education* (1972:119) termasuk dalam kategori pendidikan ketermapilan dan pelatihan kerja adalah *apprenticeship* dan *on the job training*. Di luar Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjalankan program pelatihan, pembinaan instruktur dan tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana pelatihan kerja, pemagangan, serta produktivitas (Depnakertrans, 2009). Bahkan banyak lembaga swasta lain termasuk Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja seperti ini.

g. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan dasar, dan menengah yang dilakukan melalui jalur pendidikan nonformal. Penjelasan UUSPN Pasal 17 Ayat 2 dan penjelasan Pasal 26 Ayat 3, pendidikan sederajat dengan SD/MI adalah program Paket A dan sederajat dengan SMP/MTs adalah program Paket B. Sedangkan penjelasan UUSPN Pasal 18 Ayat 3, pendidikan sederajat dengan SMA/MA adalah program Paket C. Sementara untuk jenjang pendidikan tinggi seperti Universitas Terbuka yang merupakan jalur pendidikan nonformal, justeru berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang merupakan jalur pendidikan formal.

Kontribusi Paket A terhadap angka partisipasi murni (APM) nasional SD/MI mencapai 1,5 persen dari 97 persen, Paket B terhadap angka partisipasi kasar (APK) nasional SMP/MTs mencapai 6 persen dari 110 persen, dan Paket C terhadap angka partisipasi kasar (APK) nasional SMA/SMK/MA mencapai 3 persen dari 85 persen (Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, 2009e:28). APK pendidikan formal SMP/MTs/ SMPLB/Paket B tahun 2008 mencapai 96,18 persen (Departemen Pendidikan Nasional, 2009:8). Secara kasar terdapat 3,82 persen penduduk usia 13-15 tahun belum mengenyam pendidikan SLTP, prosentase tersebut berkali lipat bila diakumulasikan

dengan pencapaian tahun sebelumnya yang dianggap *residu* yang tercecer dan yang tidak menjadi wewenang atau perhatian khusus departemen atau lembaga yang sudah ada (Hamijoyo, 2003:3).

h. Pendidikan Lain

Pendidikan lain ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (Pasal 26 ayat 3). Pendidikan ini dapat memasukan*education about aging* (Knowles, 1967:407) yang diselenggarakan untuk membangkitkan kesadaran masalah yang akan dihadapi, pertimbangan, serta rencana dalam menghadapi masa pensiun atau hari tua. Begitu pula *education for leisure* (Entwistle, 1979:167-171), karena waktu senggang bukan lagi sebagai waktu sisa setelah dipakai bekerja, namun sebagai keadaan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja.

Dalam kategori ini dapat dimasukkan pula *community education*(Djojonegoro, 1997:81-86 dan Zubaedi, 2005:182) yakni aktifitas yang arahnya untuk mendorong anggota masyarakat agar mampu mengidentifikasikan masalah dan kebutuhannya, mencari pemecahan atas problemnya, memobilisasi sumber-sumber yang penting dan melaksanakan sebuah tindakan. Berbagai istilah lain yang memiliki pengertian sama dengan *community education* adalah *Adult Education*, *Mass Education*, *Social Education*, *Extra Mural Education* yang dianggap mempercepat proses kemajuan melalui pendidikan di

luar jalur sekolah formal (Hamijoyo, 2003:1). Dengan demikian PNF meliputi usaha penyuluhan pertanian dan pelatihan kaum petani, program keaksaraan, pelatihan keterampilan kerja di luar sistem pendidikan formal, klub remaja dan pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan, gizi, keluarga berencana, koperasi dan lain sebagainya (Combs dan Manzoor,1973:10).

Jenis layanan pendidikan nonformal mencakup: pendidikan masyarakat yang ingin menyalurkan hobi dan kesenangan diri; pendidikan bagi mereka yang menginginkan peralihan pekerjaan; pendidikan bagi mereka yang mengalami keterbatasan menurut perundang-undangan; pendidikan bagi *migran* desa; pendidikan bagi mereka yang ingin mengembangkan karir atau pekerjaan; pendidikan bagi mereka yang ingin memperoleh manfaat dari kursus dan pelatihan masyarakat(Anam, 2009:55-56).

Dengan meninjau sejarah pertumbuhan dan ragam aktifitas yang dilaksanakan, PNF mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Pendidikan yang berbeda ditandai untuk mencapai bermacam-macam tujuan,
b. Menjadi pelengkap pendidikan formal,
c. Tanggung jawab penyelenggaraan dibagi oleh masyarakat, perseorangan dan gabungan keduanya,

d. Beberapa didisiplinkan secara ketat dengan waktu pengajaran, teknologi modern, perlengkapan dan buku bacaan pendukung,
e. Metode pengajaran bermacam-macam dari tatap muka atau pendidik dan kelompok belajar sampai penggunaan audio televisi, unit latihan keliling, demonstrasi, kursus korespondensi dan alat bantu visual,
f. Menekankan pada teori dan praktek langsung,
g. Penerimaan peserta didik tidak berdasarkan kredensial,
h. Pendidik memiliki kualifikasi profesional dibandingkan dengan hanya sebagai pengajar,
i. Belum banyak dokumentasi yang menunjukkan peningkatan produktifitas ekonomi, kesejahteraan hidup dan biaya pendidikan,
j. Dalam jangka pendek sering dilibatkan pada peningkatan produksi ekonomi dan perubahan sosial,
k. Sebagian besar program dilaksanakan untuk remaja dan orang dewasa
l. Memiliki kontribusi pada pembangunan nasional terutama pengembangan keterampilan dan penyesuaian nilai personal(Joesoef,1992:54-56).

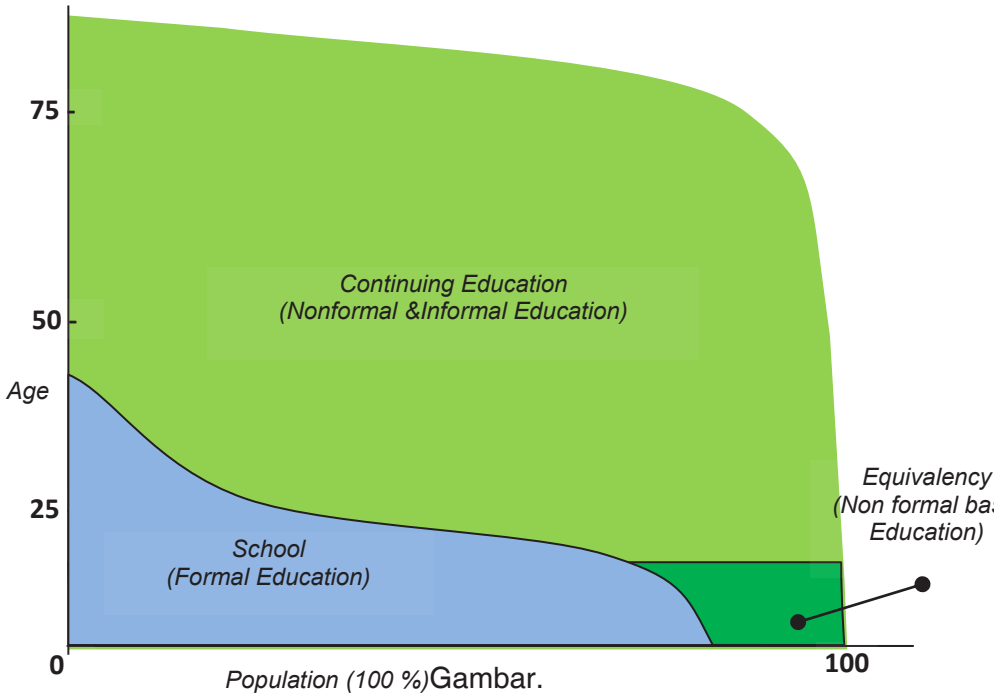

Gambar 2.1. EFA & Lifelong Education (Oyasu, 2007:2)

Seiring pendidikan sepanjang hayat, pendidikan nonformal tidak hanya diperuntukkan bagi anak 'penduduk sekolah' (*school population*) (Siagian, 1981:61) Berdasarkan konsep pendidikan seumur hidup (Lihat Gambar II.1), pendidikan di luar jalur formal melalui *equivalency education* menyediakan pendidikan bagi warga masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal, putus sekolah (*DO = Drop out*), putus jenjang. Sementara mereka yang telah meninggalkan pendidikan formal disediakan*continuing education*, termasuk*the opportunity of enhance their education through informatics* (Tinsley dalam Sandov dan Stanchev, 1988: 81).

Melihat pada dua belas kasus yang diamati Bank Dunia, karakteristik PNF memiliki ciri berikut ini:

a. Mempunyai komponen biaya modal yang relatif rendah (lebih rendah dari komponen modal untuk pendidikan formal) dan komponen biaya operasional relatif tinggi, sebagian besar berupa biaya personalia.
b. Semakin banyak program menyerupai pendidikan formal, semakin tinggi biaya modalnya, terutama lembaga berasrama.
c. Biaya satuan program yang baru berjalan jauh lebih tinggi pada tahap permulaan.
d. Biaya operasi yang tinggi memberikan sisa sedikit untuk pengadaan bahan dan sarana pendidikan sehingga menunjukkan tingkat efisiensi pendidikan amat rendah.
e. Berpeluang besar menekan biaya modal karena menggunakan fasilitas pinjaman atau sewa rendah karena dipakai saat senggang. Biaya operasi dapat ditekan karena memanfaatkan tenaga sukarelawan, atau tenaga professional atas pekerjaan sambilan.
f. Berpeluang besar meningkatkan efektifitas biaya dengan melaksanakan penyesuaian program secara intern, menerapkan teknologi baru, dan dengan menjalin kerjasama erat dengan lembaga pendidikan formal dan program PNF di daerah dan lokasi yang sama. (Combs dan Manzoor, 1973:294-295)

UUSPN belum cukup memberikan gambaran kriteria dan mewakili utuh praktek maupun penyelenggaraan pendidikan nonformal, sedangkan Peraturan Pemerintah yang mengatur PNF secara khusus belum ada. Di lain pihak PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah sudah kurang relevan karena merujuk pada UUSPN No. 2 Tahun 1989.

UUSPN, PP No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan Permendiknas No. 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan satuan PNF menjadi sumber referensi utama saat ini untuk mendapatkan gambaran PNF.

Dihadapkan pada kenyataan praktis di tengah masyarakat, PNF lebih dari sekedar gambaran yang diwakili peraturan atau ketetapan pemerintah, namun lebih merupakan praktek sehari-hari masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan. Sehingga istilah PNF mewakili pula kegiatan pendidikan diorgansisasikan dan sistematis yang berlangsung di luar kerangka sistem pendidikan formal untuk menyediakan aneka ragam pelajaran tertentu kepada kelompok tertentu baik golongan dewasa dan remaja.

Kriteria berdasarkan sifat yang dimiliki oleh PNF dapat dilihat di bawah ini:

a. Lebih fleksibel yang tidak menuntut syarat kredensial, waktu penyelenggaraan sesuai kesempatan. PNF pun dapat memiliki tujuan yang luas.
b. Lebih efektif dan efisien untuk bidang pelajaran tertentu, karena bisa spesifik sesuai kebutuhan begitu pula dengan tempat yang dapat menggunakan tempat dan berlangsung di sawah, bengkel, rumah, pasar dan tempat kerja.
c. Bersifat *quick yielding*, dalam waktu singkat dapat digunakan untuk melatih tenaga kerja yang dibutuhkan memiliki kecakapan tertentu.
d. Sangat instrumental dalam waktu relatif singkat menunjukkan hasil belajar.

Kriteria PNF tidak cukup dipahami legal formal berdasarkan definisi konseptual (Silalahi, 2009:118) atau definisi nominal (Black dan Champion, 2009:160-161) tetapi juga kenyataan di tengah masyarakat perlu mendapat perhatian sebagai definisi operasional (Silalahi, 2009:119), terutama pijakan *life long education*, atau *education permanente* yang memiliki gagasan dasar *to create a society where everybody is learning all the time* (Finger dan Asun, 2001: 23). (Joesoef dan Slamet,1981:58-59) Kriteria PNF yang tidak kaku seperti pendidikan formal memungkinkan penyelenggaraan PNF tidak memerlukan biaya modal untuk sarana, sedangkan biaya operasional yang tinggi dapat

ditekan dengan strategi pemanfaatan sukarelawan dan pekerja paruh waktu.

B. Wewenang

Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 butir c serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 butir c mengatur susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tugas yang menjadi kewenangan Dirjen PAUD dan Dikmas disebutkan Perpres 14/2015 pasal 13 mencakup:

1. Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan dan/atau program yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, dan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Sedangkan Permendikbud 11/2015 Pasal 243 menegaskan tugas Dirjen PAUD dan Dikmas adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dengan fungsi:

    a. Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan dan/atau program yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, dan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

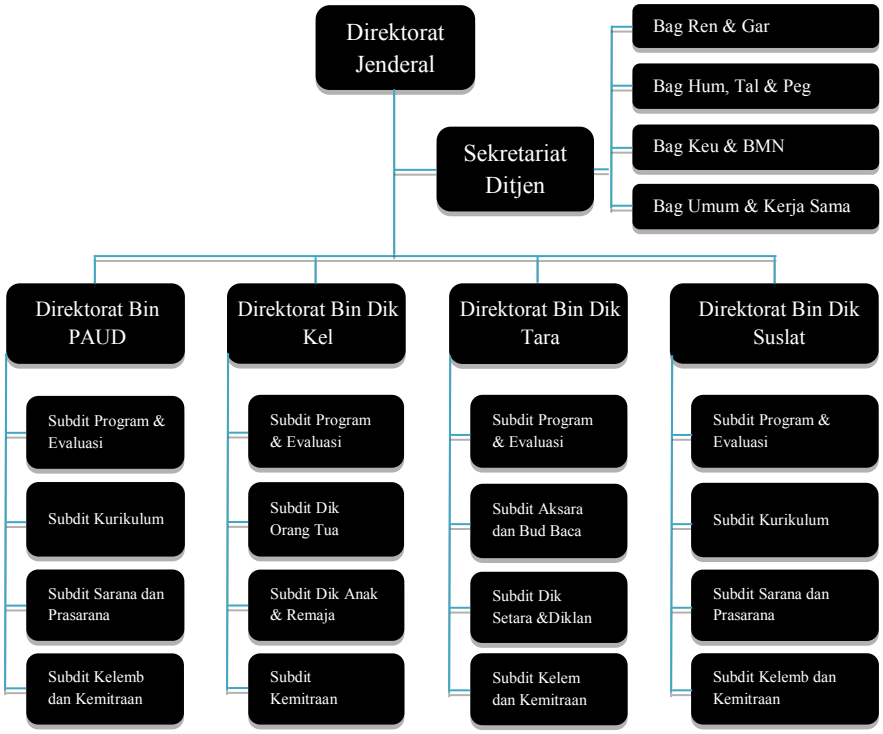

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dikjen PAUD dan Dikmas

Sebagai salah satu bagian atau unsur Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas memiliki kelengkapan struktur organisasi (lihat gambar 1.8). Struktur ini bukan sekedar menggambarkan kedudukan dan posisi melainkan juga peran strategis kebijakan, standar, norma, prosedur, kriteria dan program PAUD dan Dikmas dalam mengejawantahkan baik visi dan misi, kebijakan maupun tata nilai Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tanggung Jawab

Reformasi birokrasi bidang pendidikan menghendaki penerapan prinsip demokrasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Yulaelawati dan Sutopo Purwo Nugroho, 2006:42). Sehingga tanggung lembaga bukan hanya menjadi pemain tunggal namun lebih kepada menjadi fasilitator dalam menyedikan lingkungan yang kondusif unutk penyelenggaraan program pendidikan.

Pengendalian PNFI sekarang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Sedangkan di daerah dipikul oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Bidang atau Bagian PNFI yang sebelumnya dikenal dengan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Di wilayah Indonesia terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) PNF di tingkat pusat yaitu Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI) Regional I di Bandung dan Regional II di Semarang.

Di wilayah lain ada enam UPT Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI) di Medan, Surabaya, Mataram, Makasar, Banjarbaru, dan Papua. UPT PNF di tingkat propinsi yang dinamakan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) (Propinsi Lampung, dan Propinsi Bengkulu,), atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) (Propinsi Banten). Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota dikenal UPTD SKB.

Di tingkat kecamatan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan melibatkan Penilik PLS/Dikmas dan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) untuk mengawal peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengendalian PNF. Sementara di tingkat satuan PNF hampir semua

pendidik terdiri dari pendidik PAUD, tutor keaksaraan, tutor kesetaraan maupun fasilitator/instruktur kursus adalah berasal dari masyarakat. Begitu pula semua tenaga kependidikan seperti pengelola satuan PNF berasal dari masyarakat.

Tabel 2.1 Perbedaan Organisasi dan Tata Kerja

Unsur	BP-PAUDNI*	PP-PAUDNI**
Tugas pengembangan model pendidikan dan penerapan model	-	Pasal 2
Fungsi pengembangan model pendidikan PAUDN	-	Pasal 3
Organisasi	Seksi Program, Seksi Fasilitasi Sumber Daya, Seksi Informasi dan Kemitraan (pasal 4)	Bidang program dan informasi, serta bidang fasilitasi sumber daya (Pasal 4)
Bidang Program	-	Tugas (pasal 6) Fungsi (pasal 7)
Seksi Program	pasal 5	Seksi program dan evaluasi, pengembangan model dan penerapan model (pasal 9)
Seksi informasi dan kemitraan	pasal 5 (4)	Pengembangan kemitraan (pasal 9 ayat 2)
Bidang Fasilitasi Sumberdaya	-	Tugas (pasal 10), fungsi (pasal 11)
Seksi fasilitasi sumber daya	Pengembangan dan pendayagunaan	Pengembangan dan pendayagunaan

Unsur	BP-PAUDNI*	PP-PAUDNI**
	sumber daya manusia, sarana dan prasarana (Pasal 5 [3])	sumber daya manusia (pasal 13 [1])
Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana	-	Pengembangan dan pendayagunaan saran dan prasarana (pasal 13 [2])
Kelompok jabatan fungsional	Bertanggung jawab kepada Kepala BP-PAUDNI (pasal 6 [3])	Bertanggungjawab kepada Kepala PP-PAUDNI (pasal 14 ayat 3)
Eselonisasi	Kepala IIIa, subbagian dan kepala seksi Iva (Pasal 7)	Kepala IIb, Kepala Bidang IIIb, kepala subbagian dan kepala seksi IVa
Nomenklatur	6 BP-PAUDNI (lampiran)	2 PP-PAUDNI (lampiran)
Tatakerja	Hasil pemetaan mutu (pasal 18)	Hasil pemetaan mutu, supervise dan fasilitasi (Pasal 26)
Rincian Tugas	Permendikbud 50 Tahun 2013	

*Permendikbud No. 17 Tahun 2012

**Permendikbud No. 18 Tahun 2012

Keenam BP-PAUDNI tidak memiliki tugas pengembangan model (lihat tabel 1.6.). Namun ternyata BP-PAUDNI, justru telah lebih dahulu memiliki peraturan menteri yang mengatur rincian tugas lembaga mencakup tujuh pasal yang ditetapkan pada tanggal 24 April 2013 (Kemendikbud, 2013). Sedangkan SKB yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22/O/2000 tentang Pembentukan SKB seluruh

Indonesia tidak memiliki aturan lebih lanjut mengenai tugas melaksanakan pengembangan model.

Sejak digagas melalui pertemuan dunia untuk lingkungan dan pembangunan Earth Summit 1992 hingga tahun 2012 hingga lahir Agenda 21, praktek pendidikan menjadi bahasan menyeluruh berkenaan dengan isu lingkungan dan pembangunan yang diproyeksikan muncul di kemudian hari.

Badan dunia yang membidangi pendidikan, UNESCO adalah penanggung jawab utama UN Decade of Education for Sustainable Development selama kurun 2009 – 2014. Sebelas tema pokok yang menjadi sandaran EFSD adalah keragaman hayati, perubahan iklim, Pengurangan Resiko Bencana, keragaman budaya, pengurangan kemiskinan, keharmonisan gender, kebiasaan hidup sehat, keselarasan hidup, keamanan dan perdamaian, air bersih, serta keselarasan kehidupan kota.

Pemerintah Indonesia terutama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyatakan komitmen dengan paradigma Rencana Strategis 2010-2014 bahwa pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2010:7). Pendidikan dalam kerangka EfSD memiliki kriteria berikut:

1. Berorientasi pada warga belajar; dengan menekankan pada kebutuhan belajar, kemampuan, minat dan sikap warga belajar.
2. Lintas keilmuan dan holistik melibatkan beragam kurikulum pembelajaran
3. Memanfaatkan beragam metoda dan pendekatan; bahasa, seni, drama/tari, debat, tukar pengalaman, pedagogi.
4. Mengacu pada pendekatan berpikir sistem
5. Meningkatkan nilai tambah dengan mengedepankan norma, nilai dan prinsip yang teruji sebelum diterapkan
6. Menjunjung budaya lokal
7. Sepanjang hayat berlangsung dimana pun, melibatkan setiap orang yang dapat menjadi peserta didik maupun narasumber. (*Indonesian National Commission for* UNESCO, 2014: 11-13)

Tantangan besar yang dirasakan pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan *adalah Integrate relevant knowledge and skills in education curricula, including ICT skills, education for sustainable development as well as on sustainable consumption and production, and awareness raising, on culture's contribution to sustainable development* (*Working Group of Sustainable Development*, 2014:4).

The ASEAN Countries

BAB III

MEA : ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN

A. Produktifitas Kerja

Karakteristik pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di kawasan ASEAN telah menghadirkan ibarat dua sisi mata uang yakni harapan dan tantangan. Gambaran kedua sisi ini sekilas dapat diturunkan dari laporan tahunan sekretariat ASEAN. Sebagai contoh laju pertumbuhan penduduk kawasan sebesar 1,2 persen per tahun mendatangkan harapan bagi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dalam dua dasa warsa mendatang, tentu saja ini memunculkan tantangan agar tersedia lapangan pekerjaan bagi sekitar 750 ribu angkatan kerja baru. Hal ini merupakan analogi sederhana yang dapat diselaraskan dengan harapan dan tantangan yang menuntut peranan Ditjen PAUD dan Dikmas.

Dengan memproyeksikan peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,2 persen per tahun, maka diperkirakan dalam lima tahun mendatang kawasan ini dihuni oleh lebih dari setengah milyar penduduk. Berdasarkan situasi tahun 2013 (lihat tabel 1) dimana penduduk Indonesia memberikan kontribusi sebesar 42% jumlah di kawasan, maka lima tahun mendatang diproyeksikan terdapat 15 juta lebih penduduk Indonesia membutuhkan layanan PAUD dan Dikmas.

Bentuk layanan PAUD dan Dikmas ini tentu bukan merupakan jalur pendidikan formal, melainkan pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Sedangkan penyelenggara secara kelembagaan dapat melibatkan institusi baik sekolah maupun di luar sekolah. Contoh nyata

dan tegas sekolah sebagai jalur formal menjadi penyelenggara pendidikan informal dan nonformal adalah manakala sekolah ikut menyelenggarakan misalnya kursus atau pelatihan. Kursus atau pelatihan ini dapat bersifat akademis semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan maupun bersifat vokasi berorientasi pada sikap dan keterampilan bekerja.

Peran PAUD dan Dikmas melalui program layanan pendidikan nonformal di luar sekolah dapat berujud:

1. *it can complement schooling*;
2. *it can supplement schooling*; dan
3. *it can replace schooling.*(*Center for International Education*, 1972: iii)

Seperti apa peran PAUD dan Dikmas di kemudian hari tentu harus dipetakan melalui kajian dan pengamatan atas peristiwa dan fenomena yang telah ada serta memproyeksikan keadaan di masa mendatang untuk kemudian dikembangkan model peran dan kegiatan yang menuntut kehadiran layanan pendidikan non formal dan informal di luar sekolah.

Berkaitan dengan produktifitas tenaga kerja, dua belas faktor (Mintorogo, Sedamayanti, 19912: 11) berpengaruh sekurangkurangnya lima faktor dapat dipengaruhi oleh kegiatan dan program PAUD dan Dikmas yakni: pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap dan etika kerja, serta motivasi.

B. Keahlian Kerja

Dasar yang diperlukan untuk perkembangan dan pembangunan termasuk mensejajarkan dengan kemajuan yang berlangsung di kawasan ASEAN, mensyaratkan dua fondasi utama yaitu: bangunan dasar ekonomis dan bangunan dasar sosial (Behrendt, 1974: 40-41).

Bangunan dasar ekonomis meliputi semua bentuk dan lembaga yang memajukan perkembangan ekonomi untuk mempertinggi daya produksi seperti pengangkutan, pembangkitan tenaga listrik, pekerjaan umum, lembaga keuangan dan bank, perbengkelan dan sebagainya. Sedangkan bangunan dasar sosial mencakup susunan masyarakat, lembaga sosial dan hubungan antar manusia besertasikap penghargaan termasuk aturan dan ukuran serta bertingkah laku hingga faktor-faktor yang memperkuat kesanggupan menyusun organisasi dan bekerja.

Kecakapan mempertinggi kapasitas produksi dan menyelaraskan kemajuan sosial jelas *merupakan a process recapitulated in each individual* (Jaspers, 1933:115).

Proses rekapitulasi individu terutama dalam bekerja berlangsung sepanjang individu melaksanakan kegiatan di lingkungan pendidikan rumah (informal), sekolah (formal), maupun di masyarakat (nonformal). Terdapat enam syarat utama bagi perkembangan ekonomi yang diharapkan dalam proses pembangunan, yaitu:

1. *Indigenous forces*;
2. Mobilitas faktor produksi;
3. Akumulasi kapital;
4. Kriteria investasi sesuai kebutuhan;
5. Penyerapan kapital; dan
6. Stabilitas dan nilai serta Lembaga yang ada(Irawan dan Suparmoko, 1990: 194-195).

Berkaitan dengan syarat pertama yang menunjukkan kekuatandari dalam masyarakat, tentu ini pun berkaitan dengan rekapitulasi pengetahuan dan pengalaman seseorang. Sehingga kekuatan untuk

bekerja lebih baik dan berprestasi merupakan faktor dari dalam, sedangkan faktor dari luar merupakan pelengkap.

Apalagi perbedaan kegiatan ekonomi tradisional dengan modern bukan terletak pada nilai produk yang dihasilkan semata oleh buruh, bahan baku dan jasa trasportasi melainkan ditentukan oleh *knowledge base inputs relating to product development, fabrication and marketing that add value to a company's product or service* (Katoppo,1997:298).

C. Standarisasi Pekerjaan

Standarisasi dapat diartikan upaya, proses maupun serangkaian aktifitas berikut:

1. Penyesuaian bentuk, ukuran atau kualitas dengan pedoman standar yang dibakukan,
2. Menuju standara kriteria, konsensus, pedoman, ukuran atau acuan yang telah disepakati dan ditetapkan,
3. Memenuhi tuntutan kriteria, konsensus, pedoman, ukuran atau acuan dalam upaya mencapai standar nasional Pendidikan.

Ukuran prestasi pekerjaan dapat dilihat dalam contoh Uraian Jabatan Analis Bidang Program dan Evaluasi (Hardiyanto, 2014). Dalam menyikapi tantangan dan standar pekerjaan yang ditawarkan Sondang P. Siagian (1985: 137) menilai diperlukan perhatian utama terhadap lima belas perilaku yang bersinggungan dengan prestasi kerja yaitu:

1. Daya tahan terhadap tekanan
2. Energi fisik
3. Kreatifitas
4. Kepercayaan pada diri sendiri
5. Kemampuan menyesuaikan diri
6. Kepemimpinan
7. Integritas pribadi
8. Keseimbangan emosional
9. Entusiasme
10. Mutu pekerjaan
11. Ketepatan waktu
12. Prakarsa
13. Kemampuan
14. Komunikasi

Dalam penerapan di organisasi seperti perusahaan bisnis maupun instansi pemerintah, standar pekerjaan identik dengan prestasi sebagai indikator yang rinci, konkrit dan dapat diukur dari pekerjaan Karyawan yang diasarkan kepada dua elemen uraian jabatan dan sasaran perusahaan (Boyd, 1993:233).

MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

BAB IV

KEBIJAKAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS MENGHADAPI MEA

A. Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Berbasis Potensi Lokal

1. Pengembangan Citra Dan Aktualisasi Diri

Citra dan aktualisasi diri ini merupakan soft competence (Cynthia, A. Gafur Sangaji dan Dedi Alfiandri, 2008: 12) yang menyumbang tujuh puluh persen pengaruh terhadap keberhasilan yakni kepribadian, konsep diri dan sikap mental. Persaingan kawasan yang diciptakan oleh MEA mensyaratkan kepribadian yang mampu menopang produktifitas kerja. Terdapat sepuluh unsur kepribadian yang perlu dikembangkan sebagai citra dan aktualisasi yang dibutuhkan yakni:

a. *Self* (diri)
b. *Intelegence* (Kecerdasan)
c. *Appearance* (Penampilan)
d. *Health* (Keadaan kesehatan)
e. *Skill* (Keahlian)
f. *Knowledge* (Pengetahuan)
g. *Emotional Control* (Pengendalian Emosi)
h. *Attitude* (Sikap)
i. *Character* (Karakter)
j. *Roles* (Peranan)(Mintorogo dan Sedarmayanti, 1992:14)

Diperlukan ciri-ciri pribadi yang dapat menjadi pelaku utama dalam era persaingan yang ditawarkan oleh MEA, sekurangkurangnya ada sebelas karakteristik individu sebagai berikut:

a. Hasrat keingintahuan yang cukup besar;
b. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru;
c. Panjang akal;
d. Keinginan untuk menemukan dan meneliti;
e. Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit;
f. Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas;
g. Berpikir fleksibel;
h. Menanggapi pertanyaanyang diajukan serta cenderung memberikan jawaban lebih banyak;
i. Memiliki semangat bertanya serta meneliti;
j. Memiliki daya abstraki yang cukup baik;
k. Memiliki latar belakang membaca yang cukup luas.(Slameto, 1995: 147-148)

Kesebelas butir karakteristik di atas yang dikembangkan secara optimal merupakan salah satu jawaban atas kelemahan Indonesia dalam daya saing baik industri produk maupun jasa (Katoppo, 1997: 160). Kebijakan PAUD dan Dikmas yang mendukung peningkatan daya saing adalah melalui *life long integrated education* (Hanafiah, 1991: 9) dengan mengembangkan pendidikan sebagai kesatuan utuh dan tidak terpisahkan sejak seseorang mampu belajar dan tidak mampu lagi, serta memadukan kegiatan pendidikan dengan kegiatan hidup masyarakat.

2. Penguatan Kompetensi

Korea Selatan sebagai bangsa dengan produktifitas tinggi ternyata didukung oleh derajat pendidikan warganya dengan jumlah Ph.D per kapita tertinggi di dunia sekarang, sedangkan Jepang memiliki rasio insinyur sebanyak dua puluh empat per seribu penduduk (Katoppo, 1997: 327).

Tugas besar dalam menghadapi MEA adalah menguatkan kompetensi masyarakat Indonesia yang lebih banyak berada di luar sekolah, apalagi *knowledge in any country is a national reseource* (Deming, 1986: 466). Berbeda dengan bahan mentah seperti besi yang tidak dapat berubah, pengetahuan dalam berbagai bidang bisa ditingkatkan dengan pendidikan,yang tidak hanya diusahakan dalam suasana “hubungan guru dan murid” akan tetapi dalam suasana “pengembangan an diri sendiri” (*self development*) dengan mendisiplinkan diri untuk mencari ilmu dan pengetahuan melalui

berbagai kegiatan seperti membaca, mendengarkan radio, televisi (Siagian,1982: 61)

3. Penguatan Jejaring kerja

Pengelolaan kegiatan baik perusahaan maupun lembaga pemerintah bukan lagi mengedepankan shareholder management tetapi berubah menjadi stakeholder management (Katoppo, 1997: 222). Dengan dengan demikian kepentingan komponen lingkungan strategi juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.Komponen lingkungan yang dimaksud termasuk kepentingan negara, sesama organisasi, profesi lain, konsumen hingga lingkungan hidup. Jalinan peran yang terjadi adalah bentuk kemitraan untuk saling memberikan manfaat dan mencapai hasil optimal.

Penyelenggaraan PAUD dan Dikmas baik program dan kelembagaan oleh karenaitu tidak dapat dilepaskan dari jalinan antara pendidikan formal dan non formal (Gambar 1.7)

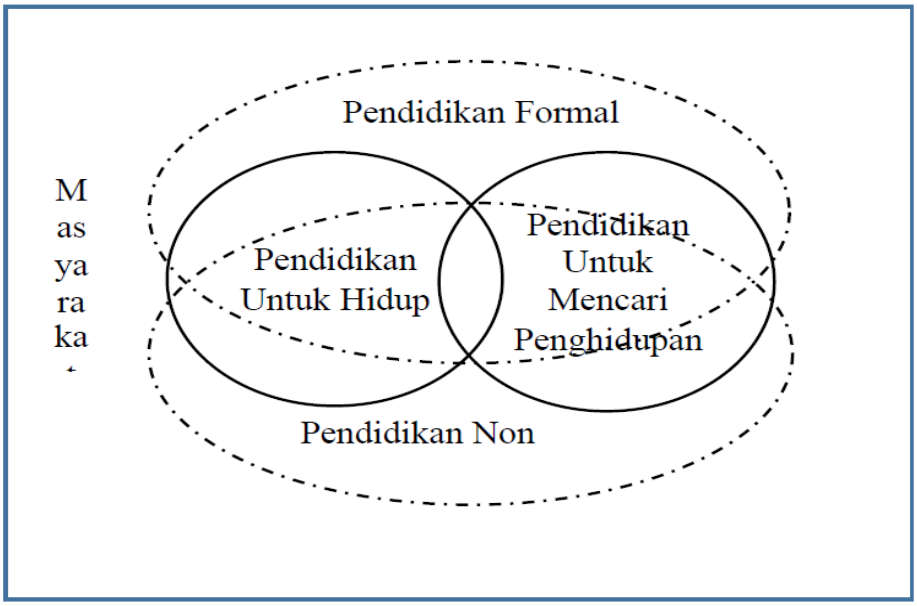

Gambar 1.7 Jalinan Pendidikan Formal dan Non Formal (Sukamto, 1988:23)

B. Pengembangan Program dan Produk

Menyadari hakekat pendidikan sebagaimana dikemukakan Ki Hajar Dewantara (Bastian, 2002:12) yaitu menuntun segala kekuatan

kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, maka pengembangan program dan produk layanan PAUD dan Dikmas tentu harus memperhatikan insan individu sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, karena menurut Iman Taufik (Cynthia, A. Gafur Sangadji dan Dedi Alfiandri, 2008:12) pendidikan kita terlalu hard competence, maka bangsa kita kurang kreatif.

Nilai dasar yang harus dikembangkan dalam metodologi pendidikan adalah *menekankan soft competence seperti relationship building, team work and cooperation, self confidence, organizational commitmen, interpersonal understanding, information seeking dan organizational awareness*.

Pemetaan layanan PAUD dan Dikmas menjadi rujukan bagi pengembangan ragam program dan produk sebagaimana dapat diwakili dari diagram korelasi PNF (Gambar 1.8)

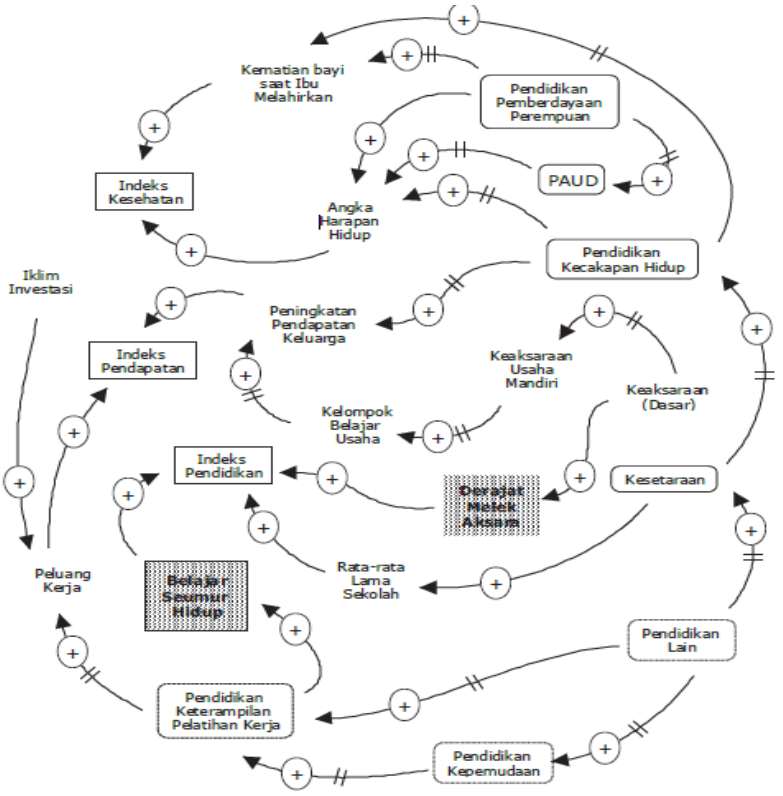

Gambar 1.8 Korelasi PNF terhadap IPM (Hardiayanto, 2015)

C. Penguatan Kelembagaan

1. Penetapan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan

Hal utama yang mutlak di sediakan adalah kesem patan dan peluang un tuk seluruh anggota masyarakat di luar seko lah menikmati wak tu belajar, sekaligus mening katkan kapasitas diri mereka. Sementara tidak ada lagi sekolah yang bisa digunakan atau lebih tepat kurikulumpendidikan formal tidak menyasar masyarakat di luar sekolah, maka perlu dikembangkan prasarana yang memungkinkan, kelompok mayoritas di masyarakat ini untuk tetap menyegarkan dan memperbaharui pengetahuan, sikap dan keterampilan mereka.

Pilihan terletak pada penegasan dan penguatan lembaga pemberi layanan PAUD dan Dikmas seperti SKB agar menjadi satuan pendidikan ujung tombak program PAUD dan Dikmas, termasuk menyemai benih bagi perkembangan kebon bibit dan kebun percontohan tentang program Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP) (Supriono,2004:13).

Implementasi dari pilihan ini telah diluncurkan melalui Surat Nomor1085/C.C4.1/PR/2015 perihal Permohonan Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, bertanggal 3 Juli 2015. Surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia.

2. Pemantapan Pusat Kegaiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Di pihak lain, prakarsa masyarakat mengembangkan PKBM dapat memperoleh penghargaan, mengingat di beberapa negara tetangga lembaga ini cukup berperan aktif menyediakan program dan layanan PAUD dan Dikmas. PKBM adalah suatu wahana luar sekolah yang dicirikan dan dikelola oleh suatu komunitas tertentu/masyarakat setempat yang secara khusus berkonsentrasi dalam berbagai usaha pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat tersebut. SoonKarnLearnRoo ChumChon atau *Community Learning Centre* sebagai padanan PKBM di Thailand (ONFEC, 2007: 32) *served as a learning centre, a community forum, a community training centre, a community reading centre, as well as a coordination centre for community development. It was operated through the management of the community committee to create a sense of ownership, facilitated and supported by both District and Provincial Non-Formal Education Centres through operations of CLC Facilitators*. Sementara di Jepang Kominkan bertujuan *shall provide the people living in specific areas such as a city, town, or village with education adapted to meet the demands of actual life and implement academic and cultural activities, shall contribute to the cultivation of residents, improve health, develop character, enliven daily culture, and enhance social welfare* (SED dan ACCU, 2008:16).

Di Cina pun terdapat wadah pendidikan masyarakat sebagaimana CLC yang dinamakan 亚运村文体中心 (Ya Yun Cun Wen Ti Zhong Xin = Pusat Olah Raga dan Keaksaraan Masyarakat) (Hardiyanto, 2005:9). PKBM bukan satuan pendidikan sepertisekolah formal di tanah air melainkan wadah pendidikan kemasyarakatan (Zubaedi, 2005:182) berbagai jenis aktifitas atau program pendidikan yang dirancang untuk melayani masyarakat sebagai sekolah masyarakat yang diabdikan untuk membuat pusat-pusat sekolah masyarakat untuk pendidikan, kebudayaan, aktifitas rekreasi untuk warga di segala usia.

Melalui PKBM yang dicirikan sebagai pangkalan kegiatan pendidikan di masyarakat dapat lebih optimal mengembangkan dinamika sosial masyarakat dalam pendidikan luar sekolah atau PNF dibandingkan dengan menempatkan PKBM sebagai satuan PNF sebagaimana sekolah sebagai satuan pendidikan formal. Sehingga

mampu menjamin maksud standar pengelolaan PNF sebagaimana dikehendaki Permendiknas 49 Tahun 2007.

3. Pengembangan Komite PAUD dan Dikmas

Untuk menjamin perencanaan program PAUD dan Dikmas dilaksanakan sesuai tahapan pelaksanaan dan memenuhi tujuan diharapkan, maka secara legal program dan anggaran PNF harus eksplisit dicantumkan dalam dokumen perencanaan di bawah kelembagaan seperti Musyaawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Dokumen ini merupakan tujuan antara, sebelum eksekusi program dan layanan PAUD dan Dikmas ditetapkan pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan mulai dari penanggung jawab, pengelola, hingga sasaran pelaksanaan program secara jelas. Wadah seperti komite akan sangat bermanfaat memainkan peran dan fungsinya sebagai koordinator, termasuk memilih, memilah dan menyalurkan sumber daya sekaligus dana untuk kelancaran progam dan layanan PAUD dan Dikmas. Sebagai koordinator diharapkan mampu memelihara sinergitas dan kepentingan menyeimbangkan yang menjadi alasan utama masyarakat mendukung program.

Komite bidang PAUD dan Dikmas seperti di tingkat desa menjadi mutlak perlu sebagai mitra kepala daerah dalam mengemas dan menghasilkan kebijakan program dan layanan PAUD dan Dikmas. Kenyataan pengelolaan pendidikan yang berada di bawah bidang kesejahteraan rakyat di LMD, telah mengaburkan makna dan peran penting PNF. Apa hendak dikata, hal ini belum mendapat perhatian pihak berwenang mengingat tata kelola pemerntahan di tingkat nasional masih menempatkan koordinator kesejahteraan rakyat yang mengurusi pendidikan, termasuk pendidikan nonformal di dalamnya.

Kelembagaan bidang pendidikan di tingkat perdesaan yang telah ada sebagai contoh sekarang memerlukan penguatan untuk dapat menjembatani kebutuhan dan penyelenggaraan PAUD dan Dikmas di tengah masyarakat. Penguatan kelembagaanini tidak merubah tatanan yang berlaku dan telah ada seperti Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat perdesaaan dapat memungkinkan 'Forum Pendidikan' di tingkat perdesaan/ perkotaan, kecamatan, kota/kabupaten, propinsi hingga

tingkat nasional menjadi tempat berkumpul tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dalam membicarakan pemecahan masalah pendidikan terutama PAUD dan Dikmas yang berorientasi terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Kelembagaan PAUD dan Dikmas ini tidak harus berada dalam institusi formal yang akan menambah beban pengelolaan dan pengurusan. Kelembagaan ini pun tidak mesti merupakan satuan pendidikan namun dapat diujudkan melalui pertemuan berkala yang khusus membicarakan perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan kemajuan dalam penyelenggaraan PAUD dan Dikmas di berbagai tingkatan. Bentuk pertemuan ini dapat menyerupai penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan berdasarkan mekanisme Musyawarah Antar Desa (MAD) (Ditjen PMD,2010:IV)

4. Penyempurnaan Undang-Undang Sisdiknas

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memiliki beberapa kekurangan dalam melihat Pendidikan Non Formal dan Informal sebagai fenomena pendidikan di luar sekolah.Banyak isu strategis dan kunci penyelenggaraan PAUD dan Dikmas yang belum mendapat landasan legal dalam undang undang yang mengatur sistem pendidikan nasional. Sebagai sebuah aturan terhadap sistem pendidikan, seyogyanya tidakhanya menekankan pada sistem persekolahan pendidikan formal. Namun lebih mengedepankan Pendidikan Seumur Hidup, serta Pendidikan Untuk Semua yang telah dikemas menjadi *Education for Sustainable Development*.

Berkenaan dengan terminasi pembangunan yang lekat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kepentingan pendidikan di luar sekolah telah dieliminir sejak koefisien melek aksara ditanggalkan. Laporan UNDP sejak 2010 hanya menghitung lama sekolah untuk parameter pendidikan (Hardiyanto, 2014:23). Pemikiran untuk mengkonversi lama sekolah menjadi besaran lama waktu belajar dalam satuan jamakan memberikan kesempatan dan kontribusi tetap diperhitungkan. Sehingga untuk parameter pendidikan dapat dikembangkan parameter lama waktu belajar, sehingga program dan layanan pendidikan non formal dapat dikalkulasi sebagai kontribusi perhitungan (IPM). Secara politis kalkulasi ini memberikan tempat

strategis dalam benak dan paradigma perencanaan wilayah atau kawasan.

Keunggulan dan karakteristik baik program maupun layanan PAUD dan Dikmas telah menempati ruang publik yang belum dikenal banyak dalam pendidikan sekolah, seperti pendekatan kebutuhan belajar, metodologi andaragogy hingga daur pengalaman. Masih ada harapan untuk meneguhkan peran dan sumbangan positif dengan menyatakan dalam peraturan serta kebijakan yang ada.

5. *Joint Working Group* Indonesia – Singapura

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah membahas isu strategis di bidang PAUD berkenaan "*Standard and System Monitoring and Evaluation on Early Childhood Education Learning Result*" pada tanggal 24-25 November 2015 di Medan, Sumatera Utara.

Momentum yang sangat baik ini memberikan manfaat untuk mendapatkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) program Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dilakukan oleh pemerintah Singapura. Penyelenggara program PAUD di Indonesia dapat belajar banyak dan melihat langsung *implementasi standard* dan sistem di Singapura, sekaligus memberikan masukan dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan terutama standar dan sistem *monitoring.*

PENUTUP

Pembangunan merupakan '*inner will*' proses melibatkan diri, inisiatif dan partisipasi kreatif masyarakat melalui proses pendewasaan dalam Pendidikan yang berlangsung tidak hanya di dalam sekolah. MEA sebagai sebuah momen untuk meningkatkan upaya pembangunan menghendaki intensitas dan ekspansi pemanfaatan setiap peluangyang ditawarkan untuk maju dan berkembang mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kompleksitas dan masalah pendidikan nonformal mulai dari tingkat nasional hingga di tengah masyarakat tidak nampak nyata dan langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Namun akumulasi pengetahuan, sikap dan kompetensi masyarakat sebagai hasil proses pembelajaran di luar sekolah akan menunjukkan keunggulan dan daya saing yang berbeda.

Dengan demikian dapat disimpulkan tiga hal, pertama, rancang bangun pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF memperhatikan asal usul pembentukan wilayah terutama perdesaan/perkotaan sebagai unit analisa dalam membangun respon terhadap MEA. Kedua, Tipologi dan struktur pengelolaan perdesaan/perkotaan dapat menguatkan kontribusi PNF sebagai pencetus program pembangunan masyarakat dalam menjawaba tuntutan keadaan dan kondisi MEA. Ketiga, pengelola PNF di berbagai level pengelolaan dan penyelanggaraa tidak bisa *immune* dan menutup dari *best practice* pemberdayaan masyarakat yang ada agar senantiasa sinkron dengan tantangan MEA.

Lebih lanjut, perlu diperhatikan seksama kebijakan PNF yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat perdesaan. Selama ini kebijakan terhadap masyarakat perdesaan yang menjadi sasaran/ warga belajar pembelajaran di luar sekolah kerap kali luput dari amatan pembuat keputusan dan praktisi pendidikan nonformal akibat orientasi program yang didominasi kepentingan kementerian terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dale. (1993). *Seri Ilmu dan Seni Manajemen Bisnis; Memimpin Manusia*. Cetakan II. Gramedia: Jakarta.

Brockmann, Michaela, Linda Clarke, dan Christopher Winch. (2011). *Knowledge, Skills and Competence in the European Labour Market: What's in a Vocational Qualification?*. Routledge: London dan New York.

Center for International Education. (1972). *Nonformal Alternatives to Schooling: A Glossary of Educational Methods*. Hills House South: University of Massachusetts.

Cynthia, Ida, A. Gafur Sangaji dan Dedi Alfiandri. (2008). *Jika tidak Memiliki Daya Saing: Jadi Kuli di Negera Sendiri. Nukilan Pemikiran Ir. Iman Taufik*. PapasSinar Sinanti: Jakarta.

Destinasi Indonesia. (2014). *7 Negara Asia Pemimpin Wisata Media*. Cakrawala. NO.11 Vol I-2014.

Evans, David R. (1979). *Games and Simulations in Literacy Training. Hulton Educational Publications Ltd in co-operation with the International Institute for Adult Literay Methods*. Tehran.

Entwisttle, Harold. (1979). *Class Culture and Education(Reprinted)*. Methuen: London.

Gasim, Hasnah. (2010). *Peran Keberaksaraan untuk Pribadi Menghadapi Tantangan Masa Depan dalam Jurnal Akrab* Volume I. Edisi I. Maret 2010. Direktorat Pendidikan Masyarakat – Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementrian Pendidikan Nasional: Jakarta.

Gautama, Candra dan Bagus Dharmawan (Ed.). (2008). *Prof. Dr. Soedijarto, MA: Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Kompas Media Nusantara: Jakarta.

Hanafiah, Rahayu. (1991). *Komitmen Pendidikan Luar Sekolah terhadap Membelajarkan Masyarkat Sepanjang Hayat*. University Press IKIP: Bandung.

Indonesian National Commission for UNESCO. (2014). *Education for Sustainable Development in Indonesia: Implementation and Success Story*. Jakarta: Ministry of Education and Culture.

Irawan, dan M. Suparmoko. (1990). *Ekonomi Pembangunan. Edisi IV. Cetakan ke-2*. BPFE: Yogyakarta.

Katoppo, Aristides. (1997). *Dari Meja Tanri Abeng: Gagasan, Wawasan, TErapan dan Renungan*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Masanori, Kono. (2009). *Creating a Village Prepared for Disasters Where the Spirit of Gotong Royong Dwells dalam Tales of Hope II: Innovative Grassroots Approaches to Education for Sustainbale Development (ESD) in Asia and the Pacific*. ACCU: Tokyo.

Mintorogo, A. dan Sedarmayanti. (1992). *Pengembangan Kepribadian dalam rangka Meningkatkan Produktifitas Kerja*. Ilham Jaya: Bandung.

Napitupulu, Washington P. (1989). *On Literacy in Indonesia. Department of Education and Culture*: Jakarta.

ONFEC. (2006). *ONFEC Annual Report. Bangkok: Foreign Relations Section Strategy and Planning Division - Ministry of Education*, Kingdom of Thailand.

Papanek, Gustav F., Raden Pardede, dan Suahasil Nazara. (2014). *Pilihan Ekonomi yang dihadapi Presiden Baru*. Pusat Transformasi Kebijakan Publik: Jakarta.

Pikiran Rakyat. (2015). *Bupati Dedi Mulyadi jadi Pembicara ASEAN Summit: Tawarkan Industri Berbasis Pedesaan*. Jawa Barat. No. 232 Tahun L, Senin 23 Nopember 2015.

Rukmana, Nana, (2006). *Strategic Partnering for Educational Management: Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*. Alfabeta: Bandung.

SED and ACCU. (2008). *Kominkan: Community Learning Centers (CLC) of Japan*. Tokyo: Social Education Division and Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO.

Senghaas, Dieter. (1988). *Tata Ekonomi Dunia dan Politik Pembangunan. Diterjemahkan oleh Aan Effendi*. LP3ES: Jakarta.

Sendov, Blagovest and Ivan Stanchev (Ed.). (1988). *Children in The Information Age: Opportunities for Creativity, Innovation and New Activities. Selected Papers fromThe Second International Conference Sofia, Bulgaria, 12 – 23 May 1987*.Pergamon Press: Oxford.

Shahab, Kurnadi. (2007). *Sosiologi Pedesaan*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta.

Siagian, S. P. (1981). *Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan. Cetakan VI*. Gunung Agung: Jakarta.

----------.(1985).*Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Cetakan III*. Gunung Agung: Jakarta.

Slameto. (1995). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Cetakan ke-3*. Edisi Revisi. RinekaCipta: Jakarta.

Sudiapermana, Elih dan Koeswantono. (2010). *Pendidikan Multikeaksaraan dan Teknologi Informasi-Komunikasi dalam Jurnal Akrab* Volume I. Edisi I. Maret 2010. Direktorat Pendidikan Masyarakat – Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementrian Pendidikan Nasional: Jakarta.

Sukamto. (1988). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan*. Direktorat JenderalPendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.

Supriono. (2004). *Menjadikan BPPLSP sebagai kebon Bibit Taman Nasional PLS dalam Mediksi: Media Pendidikan dan Aksi*. MajalahKomunikasi BP-PLSP Regional IV. Edisi Pembaharuan 2004.

Yulaelawati, Ella dan Sutopo Purwo Nugroho. (2006*). Pendidikan KEsetaraan Mencerahkan Anak Bangsa*. Direktorat Pendidikan Kesetaraan – Deirektorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.

Zubaedi. (2005). P*endidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ditjen PMD (2010) Laporan Tahunan 2009 PNPM Mandiri Perdesaan. ON LINE. Tersedia pada: http://www.pnpm-perdesaan.or.id/downloads/Annual%20Report%202009%20id.pdf Diunduh pada hari Kamis, 27 Januari 2011 jam 15.40

Hardiyanto, Edy (2015). Implikasi Undang-Undang Desa bagi Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF) di Perdesaan. On-Line. Tersedia pada: http://www.slideshare.net/e.hardiyanto/implikasipelaksanaan-undang-undang-desa-161115 Diunduh hari Selasa, 08 September 2015 jam 22.50

---------- (2014) Catatan Konsepsi Uraian Jabatan Analis Bidang Program dan Evaluasi. On-Line. Tersedia pada: http://www.slideshare.net/e.hardiyanto/conception-note-on-program-and-information-analyst-slideshare-100314 Diunduh hari Selasa, 08 September 2015 jam 23.50

---------- (2014) Implikasi Parameter IPM Bidang Pendidikan terhadap Program PNF. dalam BP-PAUDNI Regional II (2014). Jurnal Pendidikan Non Formal: JPNF. BP-PAUDNI Regional II, Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementrian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan: Surabaya.

---------- (2015) Pendidikan Non Formal (PNF) Menguatkan Karakter Desa dalam Prosiding Seminar dan Temu Akademisi PLS Tingkat Nasional. Departemen Pendidikan Luar Sekolah – FIP, UPI: Bandung.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2010). Renstra Kemdikbud 2010 – 2014. On-Line. Tersedia pada: https://www.scribd.com/doc/252044380/renstra-kemdikbud Diunduh: Kamis, 09 April 2015 Jam 21.30.

The ASEAN Secretariat (2003). Declaration of ASEAN Concord II (BALI CONCORD II). On-Line. Tersedia pada: http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/declaration-ofasean-concord-ii-bali-concord-ii-3 Diunduh hari Selasa, 01 September 2015 jam 23.50.

---------- (2014). ACIF Special Edition 2014. On-Line. Tersedia pada: http://www.asean.org/images/pdf/2014_upload/ACIF%20Special%20Edition%202014_web.pdf Diunduh hari Rabu, 02 September 2015 jam 08.00.

---------- (2014). ASEAN Economic Community Blueprint (8th Reprint).pdf. On-Line. Tersedia pada: http://www.asean.org/images/2015/february/asean_publications_2014/11.%20November%202014%20-%20ASEAN%20Economic%20Community%20Blueprint%20(8th%20Reprint).pdf Diunduh hari Selasa, 01 September 2015 jam 23.20.

---------- (2014). ASEAN Selected Indicator December 2014. On-Line. Tersedia pada: http://www.asean.org/news/item/selectedkey-indicators Diunduh hari Selasa, 01 September 2015 jam 23.40.

---------- (2015). ASEAN Statistical Yearbook 2014.pdf. OnLine. Tersedia pada: http://www.asean.org/images/2015/July/ASEAN-Yearbook/July%202015%20-%20ASEAN%20Statistical%20Yearbook%202014.pdf Diunduh hari Rabu, 02 September 2015 jam 07.40.

UNESCO. (2014). Education for Sustainable Development. OnLine. Tersedia pada: http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-forsustainable-development/education-for-sustainable-development Diunduh hari Kamis, 10 April 2014 jam 18.10.

Working Group on Sustainable Development. (2014). Statement by the Troika of China, Indonesia and Kazakhstan: on Focus Area 3: Health and Population Dynamics Healthy life at all ages for all and Focus Area 4: Education and Life-long Learning Provide quality education and life-long learning for all. The 11th Meeting of the Open Working Group of Sustainable Development Goals New York, 5-9 May 2014. On-Line. Tersedia pada: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8998china2.pdf Diunduh: Sabtu, 11 April 2015 Jam 19.40.

Yanuar. (2015). Hadapi MEA, Indonesia Harus Galakkan PKH. OnLine. Tersedia pada: http://paudni.kemdikbud.go.id/berita/7089. html Diunduh hari Senin, 31 Agustus 2015 jam 14.20.

Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
2015